



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 09 / September 2018

ISSN : 2085-4862

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945

- Dasim Budimansyah** | Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memantapkan Karakter Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- Endang Danial. Ar** | Pancasila dan Kematangan Demokrasi Indonesia
- Sapriya** | Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945
- Karim Suryadi** | Mewujudkan Pancasila Dalam Perbuatan: Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara
- Kokom Komalasari** | Membumikan Pancasila Melalui Pendidikan Karakter
- Syaifullah** | Memperkokoh Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dalam Membangun Warganegara Berkarakter Di Era Global
- Sri Wahyuni Tanszil** | Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Filsafat Dasar (Philosophische Grondslag) Dalam Membangun Karakter Bangsa
- Runik Machfiroh** | Strategi Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Di Era Digital (Bahaya Radikalisme Filsafat dan Ideologi)



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Riswandi; Rindra Budi Priyatmo;
Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Bayu Nugroho; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih; Rani Purwati Kemala Sari;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	ix
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	xiii
Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memantapkan Karakter Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	1
Pancasila Dan Kematangan Demokrasi Indonesia	15
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945.....	25
Mewujudkan Pancasila Dalam Perbuatan: Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara	37
Membumikan Pancasila Melalui Pendidikan Karakter	45
Memperkokoh Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dalam Membangun Warganegara Berkarakter Di Era Global.....	57
Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Filsafat Dasar (<i>Philosophische Grondslag</i>) Dalam Membangun Karakter Bangsa.....	69
Strategi Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Di Era Digital (Bahaya Radikalisme Filsafat Dan Ideologi).....	81



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema "*Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian atau kajian yang disusun dalam rangka memperkaya materi kajian tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upaya-upaya melakukan penataan konstitusi agar sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang dan tantangan zaman. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Dasim Budimansyah, dengan judul tulisan "*Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memantapkan Karakter Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*". Penulis menuturkan bahwa pembangunan bangsa dan

pembangunan karakter merupakan komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat. Pasca reformasi usaha-usaha tersebut akan lebih mudah dicapai karena wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and character building) meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral. Akan tetapi harapan tersebut hingga kini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berkespresi. Pada beberapa tahun terakhir terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dalam tiga dekade terakhir Indonesia tengah mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, manusia, dan budaya. Membaca situasi pasca reformasi terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini. Pertama, setelah tumbangunya struktur kekuasaan "otokrasi" ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki. Kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity). Perlu memantapkan karakter Pancasila dengan memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara dan membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi menekankan pada pembenahan moral hubungan antarwarganegara dan penanaman nilai kerukunan. Diperlukan kebijakan untuk mereposisi Program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kedalam tiga peran, yaitu: (1) PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah); (2) PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan; (3) PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan.

Kedua, Endang Danial Ar, dengan judul tulisan "*Pancasila dan Kematangan Demokrasi Indonesia*". Penulis menuturkan bahwa kematangan demokrasi secara alamiah berjalan seperti layaknya kehidupan biologis. Tumbuh berkembang dan matang. Dalam perjalanan menuju kematangan demokrasi bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai masalah sosial politik yang timbul, sejak kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini. Secara strategik politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia meyakini adanya kemampuan Pancasila sebagai idiologi negara. Eksistensi Pancasila secara konstitusional sebagai dasar negara, sekaligus sebagai falsafah dan believe system, sehingga dalam perjalanan hidup bangsa menjadi modal sosial mengembangkan demokrasi yang menjamin kebebasan, toleransi dan kerukunan hidup beragama, menciptakan stabilitas dan integrasi sosial. Pengalaman hidup bangsa Indonesia telah diuji oleh berbagai gangguan, dan tantangan pergolakan sosio politik masa lalu, kekuasaan otoriter sentralistik, serta subversi anasir-anasir asing, kekuatan ekonomi global yang didera oleh teknologi komunikasi yang hebat, namun bangsa Indonesia tetap eksis. Berbagai upaya pemerintah dalam sosialisasi implementasi Pancasila dan UUD 1945 secara konkrit dan konsekuen terus digalakan dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Pendekatan terus dikembangkan dengan berbagai cara, dari masa ke masa seiring

dengan dinamika sosio politik kultural yang ada. Sekaligus melahirkan berbagai inspirasi yang menyuburkan kehidupan demokrasi di masyarakat yang semakin matang, dalam arti semakin lancarnya saluran inspirasi masyarakat yang secara partisipatif mampu memberikan kontribusi terhadap negaranya. Terjaminnya kehidupan ketatanegaraan yang bersendikan pada penghargaan hak dan kewajiban individu maupun kelompok. Tidak heran pada belahan dunia lain Indonesia dijadikan sebagai model terbaik dalam kehidupan toleransi antar umat beragama, dalam menciptakan integrasi sosial.

Ketiga, Sapriya dengan judul tulisan *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945”*. Tulisan ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya bagi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dimaknai bahwa tidak ada Indonesia bila tidak ada Pancasila. Mengingat kedudukannya yang sangat penting dan strategis maka bangsa Indonesia perlu memosisikan Pancasila dalam wadah yang kuat, tegas, dan sah secara hukum. Dalam artikel ini dibahas lima materi pertanyaan dan uraian jawaban. Pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; kedua, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental; ketiga, urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya menegaskan kedudukan Pancasila; keempat, rekonstruksi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan ideologisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan; dan kelima, perlu sinergitas Pancasila dalam haluan negara sebagai pedoman pembangunan.

Keempat, Karim Suryadi dengan judul tulisan *“Mewujudkan Pancasila Dalam Perbuatan”*. Penulis menjelaskan tentang mewujudkan Pancasila dalam perbuatan adalah tantangan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan langkah strategis berikut. Kesatu, melembagakan pandangan “kekitaan” yang terjauh dari pandangan sektarian yang mengkotak-kotakan masyarakat antara “kami yang baik dan benar, serta mereka yang buruk dan salah”. Kedua, mewujudkan Pancasila sebagai “jembatan kebangsaan”, yang mempersatukan entitas sosial yang berbeda, mempertemukan kepentingan mereka yang berkuasa dan warga, serta menjauhkan sikap sempit yang menjadikan Pancasila sebagai alat pembenar sikap penguasa, dan palu godam penghukum tindakan masyarakat yang kritis.

Kelima, Kokom Komalasari dengan judul artikel *“Membumikan Pancasila Melalui Pendidikan Karakter”*. Penulis menjelaskan tentang Pancasila perlu membumi tidak “berada di atas awan”, sehingga seluruh masyarakat Indonesia ber-Pancasila in action untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia hendaknya memiliki kesatuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Untuk itu perlu pendidikan karakter Pancasila. Pendidikan

karakter Pancasila erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan, sehingga memerlukan communities of character yang terdiri atas keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media, pemerintahan dan berbagai pihak. Pendidikan karakter Pancasila di sekolah dapat dilakukan melalui kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, integrasi dalam kegiatan pembelajaran seluruh mata pelajaran, pengembangan budaya sekolah (habitiasi), dan kegiatan ekstrakurikuler, serta membangun kerjasama dengan masyarakat. Praktek pendidikan karakter Pancasila didukung dengan pemberian keteladanan pemimpin, budaya teguran dan penghargaan.

Keenam, Syaifullah dengan judul tulisan *“Memperkokoh Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Dalam Membangun Warga Negara Berkarakter di Era Global”*. Penulis menjelaskan bahwa Era globalisasi tidak saja menghadirkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, melainkan secara simultan menghadirkan berbagai ekse negatif yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*). Diperlukan kompetensi warganegara yang mampu menyikapi berbagai persoalan globalisasi tersebut secara bijaksana, baik kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mumpuni, yang akan mampu menjawab berbagai persoalan globalisasi yang mengemuka. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia merupakan pilihan ideologi yang sangat tepat yang mesti dijadikan rujukan utama bagi setiap warganegara dalam bertindak dalam konteks global. Hal ini tidak lain agar sikap dan perilaku yang ditampilkannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, sikap dan perilaku berkarakter Pancasila, yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketujuh, Sri Wahyuni Tanshzil, berjudul *“Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Filsafat Dasar (Philosophische Gronslag) dalam Membangun Karakter Bangsa”*. Penulis menjelaskan bahwa Nilai-nilai Pancasila merupakan satu bentuk titik temu pemikiran dan harapan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini, menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjadi pegangan dalam bertindak agar membentuk pribadi warganegara yang memiliki serta mencerminkan jatidiri dan karakter bangsa. Urgensi internasialisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter dapat ditinjau dari tiga landasan dasar, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan pendidikan. Model implementasi yang digunakan pun variatif, dimulai dari pendekatan yang bersifat hard approach (yang dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan melalui badan resmi negara), hingga pendekatan soft approach, yang dilaksanakan secara lebih dinamis pada beberapa sektor, yaitu pendidikan, sosial-kemasyarakatan dan pemanfaatan IPTEK.

Kedelapan, Runik Machfiroh dengan judul tulisan *“Strategi Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Di Era Digital (Bahaya Radikalisme Filsafat Dan Ideologi)”*. Penulisan menjelaskan bahwa era digital telah membuat arus informasi begitu cepat dengan konten yang sulit dapat dibendung, khususnya radikalisme filsafat ideologi berupa gerakan anarkis dan gerakan komunis Marxisme-Lenin

yang tanpa kasat mata dapat mempengaruhi pemikiran, opini dan perilaku warga negara. Dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi di era digital maka, diperlukan pendekatan PKn melalui model fusi dengan berpegang pada 9 keterampilan warga negara dengan Pancasila sebagai kaidah fundamental bangsa sebagai dasarnya.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN



Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka

melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945”*. Dalam jurnal ini dibahas antara lain *“Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memantapkan Karakter Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”*, *“Pancasila dan Kematangan Demokrasi Indonesia”*, *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945”*, *“Mewujudkan Pancasila Dalam Perbuatan”*, *“Membumikan Pancasila Melalui Pendidikan Karakter”*, *“Memperkokoh Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Dalam Membangun Warga Negara Berkarakter di Era Global”*, *“Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Filsafat Dasar (Philosophische Gronslag) dalam Membangun Karakter Bangsa”*, *“Strategi Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Di Era Digital (Bahaya Radikalisme Filsafat Dan Ideologi)”*.

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa,

dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945". Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD, menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI,
Ketua,

t.t.d

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua,

t.t.d

Wakil Ketua,

t.t.d

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

t.t.d

Wakil Ketua,

t.t.d

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMANTAPKAN KARAKTER PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

(Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si)

(Guru Besar Sosiologi Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia)
budimansyah@upi.edu

Abstrak

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat. Pasca reformasi usaha-usaha tersebut akan lebih mudah dicapai karena wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and character building) meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral. Akan tetapi harapan tersebut hingga kini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi. Pada beberapa tahun terakhir terjadi berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dalam tiga dekade terakhir Indonesia tengah mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, manusia dan budaya. Membaca situasi pasca reformasi terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejala dalam masyarakat saat ini. Pertama, setelah tumbangunya struktur kekuasaan "otokrasi" ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki. Kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity). Perlu memantapkan karakter Pancasila dengan memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara dan membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi menekankan pada pembenahan moral hubungan antar warganegara dan penanaman nilai kerukunan. Diperlukan kebijakan untuk mereposisi Program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kedalam tiga peran, yaitu: (1) PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah); (2) PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan; (3) PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan.

Kata Kunci : gejala sosiologis fundamental, karakter Pancasila, kebencian sosial budaya terselubung, oligarki, otokrasi, pendidikan kewarganegaraan, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Pendahuluan

Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kata-kata mutiara yang tertuang dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan, seperti dalam naskah Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, serta yang tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat.

Adalah Presiden Sukarno tokoh yang pertama kali melontarkan pentingnya masalah *nation building* ini dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Sukarno melihat *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang dinamakan fase *liberation*, yaitu pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda. Permasalahan ini dikedepankan sebagai tanggapan terhadap keadaan Indonesia pada saat itu yang ditandai oleh makin kuatnya kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, daerah, dan partai di atas kepentingan negara dan bangsa, dan makin lunturnya idealisme (Sukarno, 1965:301). Pentingnya *character building* disampaikan oleh Presiden Sukarno pada Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962. Ketika itu, *character*

building dikaitkan dengan *nation building* dan perjuangan pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda (Sukarno, 1965:498).

Di era 'reformasi', wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Dengan kata lain, perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia dan keadilan sosial dan politik diyakini akan lebih mudah dicapai. Upaya itu diwujudkan, misalnya, melalui Amandemen UUD 1945 dan keinginan untuk merestorasi Pancasila. Akan tetapi, setelah hampir sewindu, kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berkespresi dimana kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas (tidak terkekang) dibandingkan dengan kesempatan pada masa rezim otoriter (Kalidjernih, 2008:128). Di lain pihak, di era 'transisi demokrasi' bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi kewarganegaraannya, seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme. Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitalisasi cita sipil, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Tantangan besar ke depan lainnya bagi bangsa Indonesia adalah menumbuhkan budaya dan kehidupan demokrasi (*cultural democracy*) pada

berbagai komponen masyarakat, mulai dari elit politik, para birokrat dalam sistem pemerintahan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, kaum intelektual, hingga masyarakat luas. Pembentukan struktur pemerintahan negara yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi akan menjurus pada lahirnya kehidupan demokrasi yang semu (*pseudo* demokrasi) seperti yang pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi sistem pendidikan nasional dalam membentuk dan mengembangkan kehidupan negara dan masyarakat yang semakin demokratis.

Sistem pendidikan nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 31 UUD 1945 beserta peraturan perundangan turunannya merupakan instrumen untuk mewujudkan komitmen nasional itu. Pada tataran kurikuler “pendidikan kewarganegaraan” baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan

kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah, 2007:192).

Di Indonesia, sekolah telah diberikan tanggung jawab dalam upaya pembangunan karakter sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1962 sampai sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai perubahan baik nama, orientasi, substansi, maupun pendekatan pembelajarannya. Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1962 dikenal adanya mata pelajaran Civics (Kewarganegaraan) yang tujuan dan isinya berorientasi pada substansi Manipol dan USDEK yang sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik. Pada kurun berlakunya Kurikulum 1968 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya mencakup Civics (pengetahuan kewargaan negara), ilmu bumi Indonesia, dan sejarah Indonesia (untuk sekolah dasar); dan mata pelajaran Kewargaan Negara (untuk SLP dan SLA). Tujuan dan muatannya berorientasi pada substansi UUD 1945 dan TAP MPRS serta perundangan lainnya, dengan pendekatan pembelajaran yang juga masih bersifat indoktrinatif (Soepardo, dkk, 1960).

Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pada Kurikulum 1994 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namanya

memang berbeda, namun muatan dan orientasi PMP dan PPKn adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pendekatan pembelajaran yang masih tetap didominasi oleh pendekatan indoktrinatif dengan modus transmisi nilai (*value inculcation*).

Tampaknya semua itu terjadi karena sekolah diperlakukan sebagai *socio-political institution*, dan masih belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini mestinya merupakan kebangkitan PKn untuk memposisikan dirinya sebagai faktor penghela pembangunan karakter bangsa agar dapat menyiapkan warganegara muda yang memiliki karakter ke-Indonesiaan.

Masalah Lama, Tantangan Baru

Mari kita sejenak melihat berbagai gejala dalam masyarakat kita pada beberapa tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan kita semua. *Pertama*, munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, membakar manusia hidup-hidup di keramaian kota, mutilasi, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling bunuh di jalanan.

Kedua, dalam tiga dekade terakhir ini Indonesia tengah mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, manusia, dan budaya. Dalam aspek alam fisik Indonesia telah kehilangan tanah subur kita. Luas tanah kritis di Indonesia pada tahun 2008 menurut perkiraan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial, Departemen Kehutanan RI ditaksir 77,8 juta hektar. Tanah kritis ini diperkirakan akan terus bertambah satu juta hektar setiap tahunnya. Kita makin kehilangan hak guna tanah untuk perkebunan karena semakin banyaknya perusahaan asing yang bergerak di bidang perkebunan di Indonesia. Dalam aspek alam hayati, kita telah kehilangan hutan tropis. Indonesia sekarang dikenal sebagai negara dengan

laju *deforestasi* tertinggi di dunia. Kita juga kehilangan kekayaan alam yang berasal dari laut yang diambil secara *illegal* oleh penjarah dari dalam maupun luar negeri. Dalam aspek manusia, Indonesia kehilangan daya saing. Dalam *World Competitiveness Scoreboard* tahun 2007, Indonesia menempati peringkat 54 dari 55 negara, turun dari peringkat 52 pada tahun 2006. Kita kehilangan niat untuk menaati hukum, bahkan menaati aturan yang paling sederhana yaitu aturan berlalu-lintas (Raka,2008:3). Dalam aspek budaya kita sudah kehilangan kecintaan terhadap kesenian tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa. Sebagian dari kita sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu. Sudah sekian lamanya Indonesia mendapat predikat sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi di dunia. Celaknya predikat ini tidak membuat kita merasa malu dan korupsi nyatanya terus berlangsung dengan *modus operandi* yang berubah-ubah. Kita kehilangan rasa ke-Indonesiaan kita. Tampaknya kita makin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kita kehilangan cita-cita bersama (*in-group feeling*) sebagai bangsa. Tiada lagi "*Indonesian Dream*" yang mengikat kita bersama, yang lebih menonjol adalah cita-cita golongan untuk mengalahkan golongan lain.

Indonesia sudah kehilangan banyak hal dan kehilangan ini bukan tidak mungkin masih dapat berlangsung. Jika demikian daftar kehilangan tentu

akan semakin panjang. Pertanyaannya, mungkinkah ini tanda-tanda kita akan meluncur ke arah kehilangan segala-galanya sebagaimana tersirat dalam kata-kata bijak berikut ini:

You lose your wealth, you lose nothing

You lose your health, you lose something

You lose your character, you lose everything

Tentu saja kita tidak berharap seperti itu. Kita tidak menghendaki kehilangan karakter sebagai bangsa sehingga akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu perlu mencermati dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak tersebut. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi reformasi ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini.

Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnyanya struktur kekuasaan "*otokrasi*" yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Kedua, sumber terjadinya berbagai gejala dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antarsesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*).

Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan. *Socio-cultural animosity* adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme **sosialisasi kebencian** yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosialisasi di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebencian sosial budaya terselubung ini sangat berhubungan dengan pluralitas negara-bangsa Indonesia. Contoh nyata hancurnya Yugoslavia akibat semakin menipisnya *in-group feeling* di antara etnis yang ada, sementara katup penyelamat (*safety valve institution*) untuk mengurai kebencian sosial budaya terselubung tidak bekerja efektif. Namun hal ini bukan faktor penentu, karena banyak masyarakat plural yang lain bisa membangun *platform* budaya yang mampu menghasilkan kerukunan antaretnis pada derajat yang cukup mantap. Sebagai contoh masyarakat Malaysia dengan konsep pembangunan sosial budayanya telah berhasil menyiapkan *civic culture* sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok rasial dan agama. Konflik politik sekeras apapun yang terjadi di Malaysia, tidak pernah mengusik kesepakatan ini (Wirutomo, 2001:7). Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia bahwa setiap perbedaan pandangan politik selalu ditarik lagi kepada faktor perbedaan budaya yang paling mendasar (terutama agama). Inilah yang membuat persoalan politik tidak pernah mudah diselesaikan.

Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (integrasi koersif). Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari

hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang memiliki karakter ke-Indonesiaan yang adaptif di era global.

Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (*global village*). Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. **Kenichi Ohmae** dalam bukunya yang berjudul *Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy* (1999) dan *The End of Nation State: The Rise of Regional Economies* (1996) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern.

Membangun Karakter Ke-Indonesiaan

Peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Eric Fromm (1997:24-30) menjelaskan perkembangan Eropa

sebagai perkembangan peradaban modern. Tema sentral perkembangan peradaban modern ini menurut pendapatnya adalah timbulnya kebebasan (*freedom*), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level individu kebebasan itu diawali timbulnya *self* (diri) dalam proses *individuation*, ialah lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya "tali ari-ari" sampai mulai timbulnya rasa keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan 'aku' dengan 'engkau'. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya (atau adanya tali-tali tadi), memberikan kepada individu perasaan aman (*security feeling*), perasaan kebersatuan (*belongingness*) dan perasaan bahwa ia mengakar (*rooted*) pada sesuatu. Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu yang berganti dengan kekhawatiran (*anxiety*), ketidakberdayaan (*powerless*), kemenyendirian (*aloneless*), keterombang-ambing (*uprootedness*), keraguan (*doubt*) yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (*hostility*). Siklus individuasi itu terjadi pada setiap individu, pada setiap saat, dan di setiap tempat.

Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses *individuation* sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat Barat merupakan hasil perjuangan, yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level individu, kebebasan ini juga berupa putusannya tali-tali terhadap segala macam kekuasaan: gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu, kebebasan atau putusannya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan (*anxiety*), kehilangan kekuatan (*powerless*),

kemenyendirian (*aloneless*), tidak mengakar (*uprootedness*), keragu-raguan (*doubt*), dan permusuhan (*hostility*).

Melalui proses kebebasan itu, Fromm melukiskan timbulnya sistem kapitalisme, yang terjadi pada abad ke-15 (abad pertengahan atau abad kegelapan) dan abad ke-16 (abad Reformasi Gereja atau timbulnya Protestanisme). Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur (termasuk Arab/Islam), sehingga kebudayaan Timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat (persaudaraan) dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat. Walaupun demikian dalam sistem perdagangan tersebut kapital telah berkedudukan sebagai majikan.

Sejak abad ke-16, yakni tatkala Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat lecutan **Luther** dan **Calvin**, mereka mendambakan harta kekayaan (sebagai simbol keberhasilan). Ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah terjadinya perasaan tidak aman (*insecurity feeling*), kegelisahan (*anxiety*), kehilangan

kekuatan (*powerless*), dan sebagainya.

Dari analisis itu Fromm menyimpulkan bahwa disamping orang membutuhkan kebebasan (*freedom*), ia juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau *submissiveness*). Akibat kebutuhan *submissiveness* itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbulah mekanisme untuk melarikan diri dari kebebasan atau *escape from freedom* berupa melukai diri sendiri (*masochism*), melukai orang lain (*sadism*), melenyapkan objek atau saingan (*destructiveness*), dan mengekor secara serempak (*automaton*) (Budimansyah, 2004:27).

Demikianlah kapitalisme Barat dan masyarakat modern sebagaimana diterangkan Fromm. Mereka memiliki karsa (*will*) yang kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (*insecurity feeling*) akibat melupakan nilai-nilai agama.

Kekecewaanakan peradaban modern telah menghasilkan suatu impian untuk menciptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru (lihat misalnya Giddens dalam "*The Third Way*" 1998, Etzioni dalam "*The Spirit of Community*" 1993, Robert Bellah dalam "*The Good Society*" 1992). Namun demikian, sampai akhir abad ke-20, sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang sukarela dan mandiri (seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik), peradaban manusia di dunia masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan lingkungannya. Ternyata

kunci dari kesejahteraan manusia bukan semata-mata terletak pada terciptanya hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, tetapi yang lebih mendasar adalah moralitas baru (baca: karakter baru) perlu dihembuskan kedalam sistem modern tersebut.

Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakan oleh Revolusi Prancis: "*liberte, egalite, fraternite*" (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), tetapi sampai saat ini tampaknya hanya "kebebasan" yang diperoleh, sedangkan "persamaan" masih jauh tertinggal. Ini terutama disebabkan karena moral "persaudaraan" hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Rupa-rupanya hal yang sama terjadi dalam reformasi kita. Semua golongan mabuk kebebasan, sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Mengingat akan hal itu penulis berpendapat bahwa inti dari karakter ke-Indonesiaan yang masih harus kita bangun dalam masyarakat kita adalah "persaudaraan" sebagai sikap moral baru.

Tokoh lain Robert Bellah (1999), seorang sosiolog Amerika Serikat juga menekankan pentingnya kebangkitan moral baru yang mampu melandasi pranata sosial dan menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antara masyarakat dan negara maupun antarwarganegara sendiri. Ia mengatakan bahwa semua kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan-pilihan

kita (*social choices*) yang kemudian kita bakukan dalam pranata sosial. Untuk merombaknya perlu dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini membutuhkan suatu sistem nilai, karena semua pilihan memiliki landasan moral dan etika.

Menganalisis pranata-pranata sosial berarti mempertanyakan: "bagaimana kita seharusnya hidup?" dan "bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup?". Pranata-pranata sosial yang telah mengatur bagaimana kita hidup ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan (*ideal values*). Jadi *ideal values* hanya tersimpan dalam khasanah budaya kita, tapi tidak secara efektif mengatur perilaku kita di dalam pranata sosial yang ada (Wirutomo,2001:17).

Kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993) dengan memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai keakuannya (*individualisme*) yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai ke-kitaan yang bersifat komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak). Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat kita yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hak-

haknya oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong mengidap gejala “*strong sense of entitlement*” yaitu cenderung menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum.

Etzioni menyadari terbentuknya masyarakat komunitarian hanya dapat terwujud melalui suatu gerakan sosial yang sistematis. Itulah sebabnya ia bersama kelompoknya mencanangkan kebulatan tekad gerakan “komunitarian” sebagai berikut:

1. Kita harus mampu menciptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu kehidupan pribadi orang (sikap anti *puritanisme*).
2. Kita harus mempertahankan suatu “hukum dan keteraturan” tanpa harus jatuh pada suatu “negara polisi” dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan kekuasaan pemerintah.
3. Kita harus menyelamatkan kehidupan keluarga tanpa harus membatasi hak anggotanya secara diskriminatif (misalnya memaksakan peran domestik kepada perempuan).
4. Sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa mengindoktrinasi anak muda.
5. Kita harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
6. Kita harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan hak-hak kita, tetapi justru sebagai perimbangan dari hak-hak

yang kita peroleh. Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu ditanggung.

7. Perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada komunitas, tanpa harus menjadi tumbal bagi kelompok. Oleh karena itu kerakusan individu yang tanpa batas harus diganti dengan “kepentingan pribadi” yang bermanfaat secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
8. Kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menciptakan moral baru, kehidupan sosial, dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai “kebersamaan”, tanpa adanya *puritanisme* dan penindasan. Semangat mengembangkan moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak dari pemikiran Giddens dalam “*The Third Way*” dimana ia memperjuangkan demokrasi sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara (Wirutomo, 2001:19).

Konsep karakter ke-Indonesiaan yang saya maksudkan dalam tulisan ini pada dasarnya mengacu pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan demikian merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa.

Penutup

Untuk menjawab semua persoalan tadi penulis mengajukan sebuah gagasan untuk mereposisi PKn kedalam tiga peran. *Pertama*, PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang berkarakter Pancasila. cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yang berkarakter Pancasila harus dilakukan secara sadar dan terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa,

bermufakarah untuk mufakat, dan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pembinaan warganegara yang melibatkan aspek psikopedagogis ini saya namakan pendekatan *psycho-paedagogical development*.

Kedua, PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, bermufakarah untuk mufakat, dan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa kewarganegaraan bertalian dengan masyarakat, karena disamping secara historis konsep tersebut tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitas manusia sebagai makhluk sosial politik, juga disebabkan oleh adanya usaha mewujudkan orde sosial yang baik dan diharapkan (*desirable*) melalui penguatan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan itu pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, maka masyarakat dan komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi warganegara untuk ber-PKn (*doing PKn*). Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat kita dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari

berbagai masalah sosial budaya ini dapat digolongkan kedalam empat masalah dasar yang perlu menjadi agenda dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yakni masalah kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi. Proses pembinaan warganegara yang melibatkan pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma ini saya namakan pendekatan *socio-cultural Development*.

Ketiga, PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*), bukan wahana indoktrinasi politik, dan sebagai suatu proses pencerdasan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, bermusyawarah untuk mufakat, dan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa peran negara dalam membina warganegara tidak dapat dihilangkan dengan menguatnya masyarakat civil (*civil society*). Negara sebagai suatu organisasi puncak memiliki kekuasaan untuk meningkatkan partisipasi yang

bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan yang penting diantaranya (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Proses pembinaan warganegara melalui pendidikan politik kebangsaan ini saya namakan pendekatan *socio-political intervention*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun karakter Pancasila, PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Program kurikuler merupakan pembuka cakrawala kewarganegaraan, gerakan sosio-kultural sebagai pendobrak sekat-sekat kewarganegaraan, dan pendidikan politik kebangsaan merupakan penegas partisipasi kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, R. *et.al.* (1999). *The Good Society*, New York: Vintage Books.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network.
- Budimansyah, D. (2004). *Membangkitkan Karsa Umat*, Bandung: Penerbit Genesindo Pustaka Utama.
- Budimansyah, D. (2007). "Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.1, hlm.11-26.
- Budimansyah, D. (2008). "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.2, hlm.179-198.
- Etzioni, A. (1993). *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society*, New York: Simon and Schuster.
- Fromm, E. (1997). *Lari Dari Kebebasan*, penerjemah Khamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, London: Polity Press.
- Kalidjernih, F.K. (2008). "Cita Sipil Indonesia Pasca-Kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.2, hlm.127-146.
- Ohmae, K. (1996). *The End of Nation State: The Rise of Regional Economies*, London: Harper Collins.
- Ohmae, K. (1999). *Borderless World: Power and Strategy In The Interlinked Economy*, London: Harper Collins.
- Parker, W.C., Nomiya, A., and Cogan, J. (1999). *Educating World Citizen: Toward Multinational Curriculum Development*, Washington: University Washington Press.
- Raka, I.I.D.G. (2008). *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*, Bandung: Majelis Guru Besar ITB.
- Soepardo, dkk. (1960). *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*, Jakarta: Departemen PP Dan K.
- Sukarno (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Kedua, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Wirutomo, P. (2001). *Membangun Masyarakat Adab*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

PANCASILA DAN KEMATANGAN DEMOKRASI INDONESIA

(H. Endang Danial. Ar)
(Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan,
FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)

Abstrak

Kematangan demokrasi secara alamiah berjalan seperti layaknya kehidupan biologis. Tumbuh berkembang dan matang. Dalam perjalanan menuju kematangan demokrasi bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai masalah sosial politik yang timbul, sejak kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini. Secara strategik politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia meyakini adanya kemampuan Pancasila sebagai idiologi negara. Eksistensi Pancasila secara konstitusional sebagai dasar negara, sekaligus sebagai falsafah dan believe system, sehingga dalam perjalanan hidup bangsa menjadi modal sosial mengembangkan demokrasi yang menjamin kebebasan, toleransi dan kerukunan hidup beragama, menciptakan stabilitas dan integrasi sosial. Pengalaman hidup bangsa Indonesia telah diuji oleh berbagai gangguan, dan tantangan pergolakan sosio politik masa lalu, kekuasaan otoriter sentralistik, serta subversi anasir-anasir asing, kekuatan ekonomi global yang didera oleh teknologi komunikasi yang hebat, namun bangsa Indonesia tetap eksis. Berbagai upaya pemerintah dalam sosialisasi implementasi Pancasila dan UUD 1945 secara konkrit dan konsekuen terus digalakan dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Pendekatan terus dikembangkan dengan berbagai cara, dari masa ke masa seiring dengan dinamika sosio politik kultural yang ada. Sekaligus melahirkan berbagai inspirasi yang menyuburkan kehidupan demokrasi di masyarakat yang semakin matang, dalam arti semakin lancarnya saluran inspirasi masyarakat yang secara partisipatif mampu memberikan kontribusi terhadap negaranya. Terjaminnya kehidupan ketatanegaraan yang bersendikan pada penghargaan hak dan kewajiban individu maupun kelompok. Tidak heran pada belahan dunia lain Indonesia dijadikan sebagai model terbaik dalam kehidupan toleransi antar umat beragama, dalam menciptakan integrasi sosial.

Kata Kunci : kematangan demokrasi; Pancasila dan UUD 1945, integrasi sosial

1. Pendahuluan

Dinamika kehidupan berdemokrasi di Indonesia mengalami pasang surut bahkan mendapat ujian yang amat berat. Perjuangan menegakkan pemerintahan, pengakuan dunia internasional, dan stabilitas politik oleh Presiden Soekarno sejak zaman kemerdekaan banyak mengalami tantangan hebat. Pergerakan DI TII, Pemberontakan Permesta, dan Kaharmuzakar dapat diatasi oleh pemerintah bersama masyarakat dengan baik. Perkembangan demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan dilakukannya Pemilihan Umum tahun 1955, menyalurkan aspirasi dan partisipasi politiknya pada masing-masing partai politik sebagai simbol terakomodasinya di parlemen ketika itu. Dalam perjalannya pembentukan eksistensi lembaga-lembaga sosio politik memperlihatkan gerak-riak sikap yang amat bervariasi setiap lembaga-lembaga demokrasi baik di masyarakat maupun di lembaga-lembaga negara. Demikian juga persepsi dan apresiasi terhadap Pancasila dan UUD 1945, sekalipun ada contoh dikembangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Namun salah satu yang menonjol ekstrem dari sekian lembaga partai politik dalam pengujian demokrasi, adalah Partai Komunis Indonesia tahun 1948 melakukan pemberontakan dan puncaknya terjadinya makar terhadap pemerintah yang syah tahun 1965. Walaupun dengan pengurbanan nyawa para jenderal putra terbaik bangsa, dapat diatasi dengan kekuatan dan keyakinan masyarakat bersama pemerintah terhadap ideologi negara masa itu. Persoalan ini disadari oleh pemerintah ketika itu

yakni masih kurangnya pemahaman, dan penghayatan serta pengamalan ideologi negara oleh masyarakat dan lembaga negara yang lebih konkrit dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jenderal Soeharto menjadi Prediden Republik Indonesia ketika itu membuka lembaran baru untuk Indonesia yaitu masa Orde Baru. Dinamika demokrasi terlihat gerakan-gerakan yang monumental yakni lahirnya Ketetapan MPR-RI NOMOR:II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA). Sekalipun banyak tulisan dan bahan dan pendekatan dalam memaknakan dan menafsirkan Pancasila agar tidak salah kaprah, salah satu karya Panitia Lima (Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, AA Maramis, Sunario dan AG Pringgodigdo) tahun 1977 tentang Urian Pancasila. Ide dasarnya memberikan penafsiran tunggal mengenai Pancasila untuk menghindari segala rupa penafsiran menurut pikiran-pandangan masing-masing orang akan makna Pancasila tatkala Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan menyusun UUD 1945. Panitia lima dibentuk atas anjuran Presiden Soeharto yang sebetulnya bekas Panitia Sembilan yang menandatangani perumusan Pembukaan UUD 1945. Implementasi ketetapan ini luar biasa pada masyarakat; sosialisasi, dan penyebarluasan dilakukan pendekatan melalui berbagai sarana komunikasi dan pendidikan yang menggema seluruh tanah air. Pendekatan di bidang pendidikan diharuskannya semua

jenjang dan jalur pendidikan mengikuti program Pendidikan Pemahaman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dengan berbagai cara. Di sekolah setiap warga belajar diwajibkan mengikuti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari SD sampai PT. Setiap pegawai pemerintah dan swasta harus lulus P4 program 100 jam. Demikian juga warga masyarakat, tokoh masyarakat; agama, politik, pemuda, wanita, pedagang, petani, dan tokoh lainnya diharuskan mengikuti program P4 pola 25 - 100 jam.

Selama 30 tahun pemerintahan Presiden Soeharto hasilnya cukup mengagumkan pertumbuhan ekonomi naik secara signifikan, peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, informasi dan akses pembangunan bagi masyarakat cukup tinggi. Kesan indah secara material ekonomi di Indonesia untuk warga negara dan dunia internasional ternyata tidaklah cukup, sentralisasi kebijakan ekonomi, politik, kemanan, sosio budaya, dan keyakinan beragama, tidak semulus membangun jalan tol Jagorawi ketika itu. Nyaris terbelenggu aspirasi, akomodasi politik warga negara terpola sekehendak 'pimpinan'. Otorisasi, dinasti, kolusi, korupsi, nepotisme, kekerasan terhadap hak asasi terjadi di berbagai kalangan pemerintahan. Saluran komunikasi politik tersumbat dimana-mana oleh sumbatan makanan dan kebutuhan, sehingga partisipasi politik, ekonomi 'grassroot' dibatasi ruang geraknya. Para pengamat mengatakan kondisi ini sebagai akibat dari ketidak taatan terhadap Pancasila

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa pemerintahan yang sentralistik ini menjalar ke semua aspek dan bidang kehidupan dari pusat sampai daerah menggurita sulit dilepas.

Gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa dan para cendekia peduli bangsa berusaha membangkitkan nina bobo pemerintahan otoriter. Berubah tatanan sosio politik, ekonomi, budaya, kearah kemajuan. Disentralisasi pada semua bidang pemerintahan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, semua warga sipil bisa menjadi pemimpin, berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan. Sekalipun diawali dengan pertumbuhan ekonomi minus dibawah nol, dengan bersemangat Indonesia bangkit dan kita bisa (Denny Indrayana; 2011). Perubahan sikap terhadap sakralnya UUD 1945 ternyata dapat disempurnakan melalui implementasi pasal 37 (Nimatul Huda, Prayudi, Iwan Permadi (2007) dengan gagah berani masyarakat menyambutnya. Terbukanya kran demokrasi dimana-mana dan seluruh aspek kehidupan kebebasan melanda di negeri ini nyaris kebablasan dalam kehidupanberbangsadanbermasyarakat. Penomena proses kematangan demokrasi terus berjalan; dibina, dikembangkan dan disempurnakan oleh semua warganegara, lembaga sosial terkait, komunikasi, interaksi kolaborasi demikian juga muncul eksese-gesekan sosial horizontal, maupun vertikal bisa terjadi setiap saat. Ini proses pembelajaran sosial, maturitas/ kematangan dan kedewasaan demokrasi sosial yang bisa diukur bersama. Para pejabat, politisi analisis sosio politik

dan semua warga, melihat terjadinya kematangan itu. Buah pikir, sikap dan perilaku demokrasi pada muncul ketika menghargai pendapat, berkeyakinan, beribadah, bergolongan, berpolitik, berbisnis dan berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi, yang teraplikasi dalam kehidupan berbasis ideologi Pancasila dan UUD 1945 menghidupkan nilai-nilai kreativitas, inovasi, yang menonjol akhir-akhir ini termasuk dalam konteks kenegaraan. Buah kematangan demokrasi di Indonesia salah satu bukti empirik menurut para pengamat, adalah Indonesia dianggap sebagai contoh kehidupan toleransi beragama, kerukunan hidup inter dan antar agama, sebagai model yang baik bagi negara-negara di dunia, walaupun kita menyadari masih banyak kekurangan dan kekosongan dan menjadi PR kita kedepan.

2. Kematangan Demokrasi

Kematangan berdemokrasi menurut ahli politik adalah suatu tatanan yang memperlihatkan kegiatan yang aspiratif, musyawarah, mufakat, bersama, berdasarkan kedaulatan rakyat. Yudi Latif (2016) mengatakan bahwa demokrasi yang sehattetapi sehat atau tidaknya institusi demokrasi sebagai produk ekstravaganza politik itu. Penekanan pada penyehatan institusi ini adalah konsekuensi dari pilihan Indonesia untuk keluar dari rezim stabilitas yang tertutup menuju rezim stabilitas yang terbuka. Adanya penghargaan pada warga masyarakat yang tinggi, keterlibatan antar lembaga sosial politik yang dapat dipercaya

(Kramer; 2015) dan independensi yang kuat, dan bukan kesatuan, tetapi lebih saling mempercayai (Jelsovsky; 2015). Kematangan demokrasi lebih mudah difahami dan diamati pada individu dalam berinteraksi sosial (Jelsovsky;2015). Bukan semata milik para politisi, tetapi semua warga negara termasuk para pejabat. Walaupun kematangan demokratis mau tidak mau harus dimulai dari pembicaraan tentang kualitas partai politik (Viktor Bungtilu Laiskodat, 2016), sekalipun partai politik tidak selamanya penentu kualitas demokrasi. Jika partai politik mati, maka demokrasi pun mati. Coba kita perhatikan perkembangan demokrasi di Indonesia menurut BPS sampai tahun 2015. Tahun 2013 indeks demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 62,72, tahun 2014, sebesar 73,03 dan tahun 2015 sebesar 72,82. Kelihatannya perkembangan indeks demokrasi terus meningkat di Indonesia. Kadang bisa jadi menurut para ahli tegaknya demokrasi jangan sampai kebablasan (Presiden Joko Widodo 2017, Kompas 24 Februari 2017). Hal ini mengingat tengah merebaknya fenomena politik populisme, dan gerakan-gerakan masa yang menyuarakan aspirasi, tetapi mengabaikan hak demokrasi orang lain. Keterbukaan demokrasi dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan idiologi politik tertentu, baik konservatif, fundamentalis maupun ultraliberal yang tak sesuai dengan Pancasila (Azyumardi Azra, 2017). Untuk mencegah itu kata Jimly Asshiddiqie (2017) dalam memamatkan demokrasi pengelolaan kebebasan yang dibarengi dengan perkembangan komunikasi sosial yang hebat, harus diimbangi

dengan kesamaan serta solidaritas dan persaudaraan untuk menjaga persatuan. Sehingga nampak penurunan IDI tahun 2014 (73,03) menurun 0,31 point pada tahun 2015 menjadi (72,82). Para pengamat memprediksikan penurunan ini karena perilaku elit politik yang indemokratis; tidak adil dan tidak taat hukum. Oleh karena itu kata Azyumardi harus segera memperbaiki diri dan jangan mementingkan kepentingan sendiri.

Dengan kata lain demokrasi berkembang baik, karena partai politik dengan berkembang baik pula. Oleh karena itu kekecewaan masyarakat di negara-negara berkembang tentang praktik demokrasi masih terjadi. Kekecewaan paling puncak yang tidak bisa terbendung lagi, utamanya ditujukan kepada elit partai politik (Kompas, 21 September 2015). Padahal, seburuk apapun kondisi yang terjadi tidak lantas harus membuang demokrasi ke keranjang sampah. Tapi justru yang harus dilakukan adalah memaksa para manusia politik untuk terus merestorasi, mempertanyakan, menyegarkan, dan mengubah tatanan demokrasi. Menurut Laiskodat (2016), jika voting menjadi satu-satunya cara untuk menghasilkan sebuah keputusan maka Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Padahal Indonesia berdiri di atas banyak agama, suku, dan golongan. "Ingatlah ketika tim perumus kemerdekaan itu menggunakan musyawarah untuk mufakat, bukan dengan voting,"

Kematangan demokrasi menurut hipotesis David Morris Potter (Judi Latif, 2016) layak terjadi di negara nagara maju seperti di Amerika

Serikat dan Eropa dengan munculnya kedewasaan berpikir, bersikap dan perilaku demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Namun secara individual sebagai warga negara banyak yang memiliki sikap kematangan demokrasi seperti seorang mahasiswa, sebab demokrasi akan hadir dalam kondisi yang ideal ketika rakyat yang sudah terdidik. Jika tidak, kata Judi maka *chaotic* demokrasi yang terjadi. Indonesia masih menuju ke sana, maka dinamikanya pun sangat kencang, kadang juga terjadi turbulansi. Coba kita bandingkan dengan negara tetangga dalam indek demokrasi dan kebebasan, seperti terlihat di bawah ini ;

Indeks Demokrasi 2016 di Negara-Negara Asia Tenggara

NEGARA	PERINGKAT DUNIA	INDEKS TOTAL
TIMOR LESTE	43	7,24
INDONESIA	48	6,97
FILIPINA	50	6,94
MALAYSIA	65	6,54
SINGAPURA	70	6,38
THAILAND	100	4,92
KAMBOJA	112	4,27
MYANMAR	113	4,2
VIETNAM	131	3,38
LAOS	151	2,37

Sumber : Harian Kompas; Selasa 6 Juni 2017

Makin besar angka indeks makin demokratis sebuah negara, makin besar angka peringkat makin tidak demokratis sebuah negara

Menurut tabel diatas nampaknya Indonesia di Asia Tenggara termasuk

negara yang tertinggi demokrasiya di bawah Timor Leste, dan di peringkat dunia masih lumayan. Sejalan dengan kehidupan demokrasi gambaran yang signifikan lazimnya dilihat dari nilai-nilai kebebasan di negara itu. Mari kita lihat dari segi kebebasan di Inonesia menurut survey yang ada.

dari kehendak pada kebanyakan penguasa saat itu. Tetapi juga dapat berkembang dan matang di negara sedang berkembang seperti di Asia, kasus di Mongolia (M. Steven Fish, Michael Seeberg; 2017).... *The key to the success of Mongolia's democracy lies in its powerful civil society. From the first*

PERINGKAT NEGARA BEBAS 2016 DI ASIA TENGGARA

NEGARA	HAK POLITIK	KEMERDEKAAN SIPIL	STATUS
FILIPINA	3	3	BEBAS SEBAGIAN
TIMOR LESTE	2	2	BEBAS SEBAGIAN
INDONESIA	2	4	BEBAS SEBAGIAN
SINGAPURA	4	4	BEBAS SEBAGIAN
MALAYSIA	4	4	BEBAS SEBAGIAN
THAILAND	6	5	TIDAK BEBAS
KAMBOJA	6	5	TIDAK BEBAS
MYANMAR	5	5	BEBAS SEBAGIAN
BRUNAI	6	5	TIDAK BEBAS
VIETNAM	7	5	TIDAK BEBAS
LAOS	7	6	TIDAK BEBAS

1,0-2,5 =bebas 3,0-5,0=BEBAS SEBAGIAN 5,5 -7,0 TIDAK BEBAS

Makin kecil skor peringkat makin bebas sebuah negara, makin besar skor peringkat makin tidak bebas (Sumber: Harian Kompas, Selasa 6 Juni 2017)

Indonesia dilihat dari tabel diatas termasuk negara bebas sebagian terutama untuk kemerdekaan sipil, sedangkan untuk kebebasan hal politik termasuk yang baik/bebas.

Menurut para ahli kematangan demokrasi tidak selamanya terjadi di negara maju seperti di Inggris kasus Brexit, (Matthew Goodwin; 2016) kemenangan demokrasi, berbasis dari aspirasi masyarakat, bukan

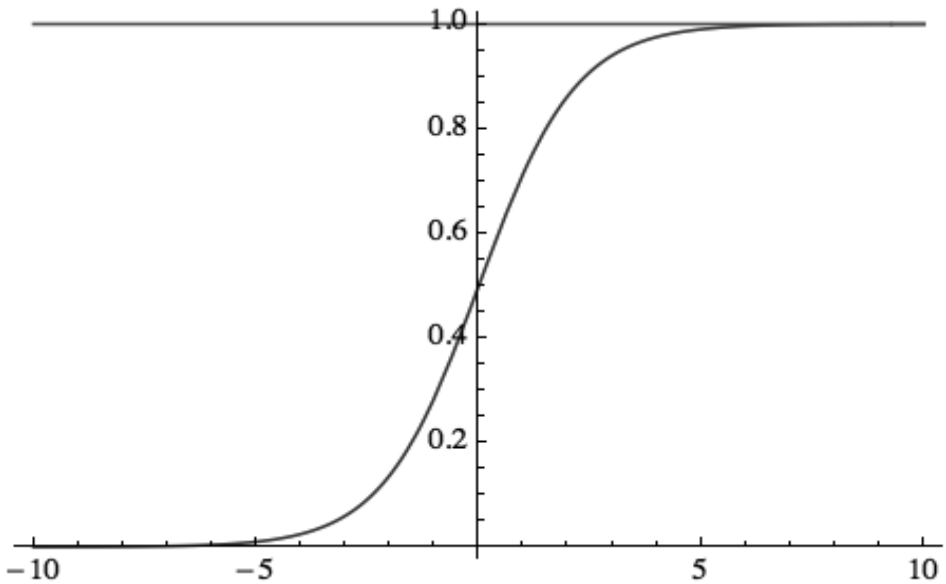
sign of the country's political opening in 1989 to today, autonomous interest groups and social movements have helped keep officialdom honest (or at minimum, alert) and the polity open. Tumbangnya rezim berkuasa yang otoriter dapat berubah dalam beberapa tahun menjadi lebih terbuka dan demokratis. Gambaran demokrasi yang matang dilihat dari proses seperti digambarkan oleh Tom Gregory (2015), seperti kematangan

tanaman, kehidupan biologi, begitu juga dalam kehidupan politik dan sosial budaya dan lainnya seperti digambarkan sebagai berikut :

The S curve is the usual measure of maturity in most things: plant and animal biology, technology, radio active decay, governments, cultures, etc.
 $y = 1 / (1 + \text{Exp} (a x))$

candidates to run against the party's own sitting representative if he/she is not "following orders".

Kematangan diartikan sebagai suatu hasil dari proses dimulai dari tumbuh, berkembang, matang, dan mati, walaupun kelihatan tidak banyak berubah. Tetapi bukan hanya dengan jumlah suara dari suatu pemilihan tetapi justru masyarakat terutama, elit politik



Time from midpoint in years, decades, etc.

Democracy is increasing, and maturing, but not changing very much. The usual practice is to elect representatives. This form has some obvious flaws in the USA, e.g., campaign financing by the dominant political parties. This is now "maturing", in the case of the Republicans, to the point that the party bosses finance new primary

untuk terus menumbuhkan semangat, mengembangkan, merestorasi, menyegarkan, dan mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil. Menurut Laiskodat (2016), jika voting menjadi satu-satunya cara untuk menghasilkan sebuah keputusan maka Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Padahal Indonesia berdiri di atas banyak agama, suku, dan golongan. "Ingatlah

ketika tim perumus kemerdekaan itu menggunakan musyawarah untuk mufakat, bukan dengan voting." Artinya lembaga demokrasi semakin dewasa dalam menyalurkan dan mengembangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuannya. Manfred Kramer, (2015) menyatakan bahwa jika berbicara tentang kematangan demokrasi, maka setidaknya harus dapat menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini : *You ask these questions:*

1. *Are human rights guaranteed for EVERY citizens in that society?*
2. *Is there complete freedom of speech? Is there a truly free press?*
3. *Is there freedom of religion?*
4. *Is there transparency in the goingson of the government?*
5. *Can ALL citizens participate freely in the political decision-making?*
6. *Are ALL politicians held responsible for their actions and decisions?*
7. *Are women treated and paid equally?*
8. *Are women represented equally in all positions of government, institutions and economy?*
9. *Can laborers freely establish unions to ensure a fair influence in economical decisions?*
10. *Is there a CLEAR separation of church and state?*
11. *Are minorities treated in a fair and acceptable manner?*
12. *Are citizens protected from discrimination about their religion, gender or ancestry? IF there is a clear and resounding YES to ALL of these questions then you have a **mature democracy.***

Jika pertanyaan itu dapat dijawab dengan yes seluruhnya atau 80% lebih maka negara itu atau masyarakat itu sudah matang demokrasinya.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi diartikan sebagai gagasan atau cita-cita yang luhur dan agung. Ide itu menyangkut sejumlah harapan yang bisa dicapai walaupun tidak seluruhnya. Menurut para ahli ideologi itu terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktur. Begitu juga ideologi negara dimaknakan sebagai cita-cita negara, pandangan dan harapan negara yang menjadi dasar pemikiran suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsanya. Lazimnya ideologi memiliki nilai-nilai luhur sebagai acuan dalam menyusun etika kehidupan sehingga dapat menjadi panduan kehidupan yang konkrit sehari-hari bagi warga masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara karena pancasila merupakan cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telah memberikan pandangan dan arah kepada masyarakat dan bangsanya sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa lain di dunia. Kelima sila dalam pancasila menjadi dasar tujuan pembangunan negara dan manusia Indonesia. Manusia Indonesia telah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan kebudayaan dan peradaban Indonesia sejak dulu. Maka tugas pemerintah menurut pandangan Panitia Lima (1977) mengawasi agar ideologi negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia. Kelima asas yang merupakan ideologi

negara itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri (Panitia Lima, 1977:22).

Nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai paradigma pembangunan, sebagai kerangka pemikiran, sumber nilai, orientasi dasar, tujuan dari suatu perkembangan. Segala kehidupan warga negara dan masyarakat serta pelaksanaan lembaga-lembaga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila. Dengan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing agamanya. Menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip etika, kebenaran, dan keadilan. Menghormati hak-hak asasi manusia dalam berkeyakinan, bekerja, berpendidikan, berkelompok, mengeluarkan pendapat, berapresiasi. Mengakui keragaman, suku, agama, kelompok, kepentingan, sehingga mampu menciptakan kerukunan hidup ditengah variasi kehidupan bangsa Indonesia. Segala sesuatu dapat diatasi dengan musyawarah untuk bermufakat dalam mengambil suatu keputusan bersama. Keadilan merupakan asas kehidupan yang diterapkan untuk semua lapisan warga negara tanpa pandang bulu, jabatan, ras, dan kepentingan. Pembangunan nasional pada dasarnya dapat mewujudkan keadilan semua pihak dalam berbagai aspek kehidupan, dari pusat sampai daerah.

Persoalannya adalah bagaimanakah nilai-nilai normatif Pancasila yang tinggi ini dapat difahami, dimengerti, disadari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi zaman Orde Baru dengan pendekatan indoktrinasi ternyata kurang membuahkan hasil yang secara konstruktif terjadi kematangan demokrasi. Malah rakyat dengan indoktrinasi rakyat malah jadi takut bukan ingin mempelajari, menghayati dan mengamalkannya. Kesan mendalam hanya bagaimanakah hidup lebih bebas, aspirasi dan partisipasi politik meningkat. Oleh karena itu pada zaman reformasi terjadinya perubahan fundamental dalam berbagai sisi, termasuk ada alergi terhadap Pancasila pada masa-masa awal reformasi. Setelah sepuluh tahun berselang baru ada semacam 'kekosongan' cita-cita dan fundamental bangsa. Muncul ide para tokoh-tokoh politik ketika itu munculah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Majelis, 2013).

4. Penutup

Kematangan demokrasi di Indonesia akan terjelma apabila bangsa Indonesia dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebab beberapa pengalaman menunjukkan hancurnya demokrasi karena warga masyarakat tidak taat dan patuh terhadap cita-cita dan harapan hidupnya. Warga masyarakat tidak taat dan patuh karena para tokoh-tokoh pejabat pemerintah, elit politik, tidak memperlihatkan kepercayaan dan kematangan dalam mengambil

keputusan, memecahkan masalah bangsa dan negaranya, tidak memberikan kemaslahatan yang demokratis, bebas dari penindasan, kekerasan dan ancaman. Dengan demikian masih diperlukan pembelajaran demokrasi, melalui berbagai cara, bukan gaya, simbol, wacana politik, tetapi karya, dan kreatifitas para pemimpin yang cerdas memberikan pencerahan, kesejahteraan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Bacaan :

- Goodwin Matthew, Ford Robert (2016) *Britain After Brexit, A Nation Divided*, *Journal of Democracy*, 1025F Street, Suit 800; Washington DC, 20004 USA. January 2017 **Volume: 28 Issue: 1 Page Numbers: 129-143**
- Gutmann Amy (2003) *Identity in Democracy*, Princeton and Oxford, Princeton University Press
- Huda Ni'matul (2007) Mendesain Ulang Kelembagaan MPR, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 3 September 2007
- Indrayana Denny (2011) *Indonesia Optimis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Judi Latif (2016) *Memperjuangkan Kematangan Demokrasi*, *Jurnal*, Partai Nasdem, id/2016/09/21,24 Februari 2017
- Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia (2012) *Undang Undang No. 12 Tahun 2012*, Tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta,
- Majelis Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi, edisi No.08/Th.VII/Agustus 2013
- Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo DJ, Maramis, Sunario, Pringgodigdo AG (1977) *Panitia Lima, Uraian PANCASILA*, Jakarta, Penerbit Mutiara.
- Kadiyono L Anisa (2013) *Religiosity and Social Adjustment of Indonesian Muslim Adolescents*, *Jurnal of Family Psychology* 27 (3); 421- 430, Juni 2013, *Jurnal Sosio Humaniora*, *Jurnal UNPAD*, *Jurnal unpad.ac.id>sosiohumaniora*. Tgl 24 Feb. 2017
- Kompas: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/03/00142616/memperjuangkan.kematangan.demokrasi>, tanggal 13 Februari 2017
- _____ *Kinerja Elit Tentukan Kualitas Demokrasi*, 24 Februari 2017.
- _____ *Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan*, Selasa 6 Juni 2017
- Ketetapan -Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia
- Laiskodat Bungtilu Victor (2016) *Indonesia Menuju Kematangan Demokrasi*, *Jurnal Agregasi*, Studi Ilmu Pemerintahan Fisip, Unikom, Vol.4.No.2. ISSN 2337-5299. 2016.
- Seeberg Michael, Fish M Steven (2017) *28The Secret Supports of Mongolian Democracy*, *Journal of Democracy*, 1025F Street, Suit 800; Washington DC, 20004 USA. January 2017 **Volume: 28 Issue: 1 Page Numbers: 129-143**

PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Sapriya

sapriya@upi.edu

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya bagi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dimaknai bahwa tidak ada Indonesia bila tidak ada Pancasila. Mengingat kedudukannya yang sangat penting dan strategis maka bangsa Indonesia perlu memposisikan Pancasila dalam wadah yang kuat, tegas dan sah secara hukum. Dalam artikel ini dibahas lima materi pertanyaan dan uraian jawaban. Pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; Kedua, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental; Ketiga, urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya menegaskan kedudukan Pancasila; Keempat, rekonstruksi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan ideologisasi Pancasila dalam perundang-undangan; dan Kelima, perlu sinergitas Pancasila dalam haluan negara sebagai pedoman pembangunan.

Kata Kunci : Kedudukan Pancasila, dasar negara, ideologi bangsa dan negara

Pendahuluan

Secara politik dan yuridis, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sudah final karena secara konstitusional telah jelas. Artinya bahwa status Pancasila tidak perlu lagi dipermasalahkan baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi bangsa. Ketentuan tentang kedudukan Pancasila pun sudah jelas, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada masa awal Pemerintahan Orde Baru bahkan telah ada konsensus nasional tentang Pancasila yang selanjutnya dibuatkan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pelaksanaan pendidikannya ada di bawah Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP7. Namun, pada pasca Pemerintahan Orde Baru Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 dicabut dan lembaga BP7 dibubarkan.

Dampak pencabutan Tap MPR dan pembubaran BP7 sangat besar pengaruhnya terhadap Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era reformasi. Patut diakui bahwa sejak bangsa ini memasuki Orde Reformasi dua dekade yang lalu, para elit seolah-olah ingin melepaskan dari budaya dan program-program Orba termasuk melepaskan diri dari program pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan

negara. Sangat kontras sikap dan perilaku para elit yang ditiru pula oleh sebagian anggota masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam pengalaman Pancasila. Misalnya, para elit politik dan pimpinan pemerintahan pada masa Orde Baru dapat dikatakan tidak afdol bila dalam berpidato tidak menyebut Pancasila dan UUD 1945, namun pada awal era reformasi hingga beberapa tahun terakhir sikap dan perilaku elit terkesan menghindar dan tidak perlu lagi menyebut nama Pancasila dan UUD 1945 ketika berpidato dan berbicara baik dalam suasana formal maupun tidak formal.

Dapat dikatakan bahwa nilai/harga Pancasila terkesan mengalami proses degradasi bahkan nyaris hilang, kecuali dalam proses pendidikan formal khususnya komunitas Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di LPTK dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah dengan sejumlah keterbatasan dukungan dari unsur program pemerintah. Terkesan pemerintah telah abai dalam upaya yang sungguh-sungguh melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan warga negara dan masyarakat.

Patut diakui pula bahwa pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pernah ada RPJM (2009) tentang pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Pendidikan karakter telah diarahkan pada Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pernah ditembuskan dalam kurikulum sekolah namun terkesan upaya ini tidak segenyar dan seserius

upaya pemasyarakatan Pancasila pada era Orde Baru dengan P4 nya. Program pendidikan karakter yang sebenarnya mengandung nilai-nilai yang telah tercakup dalam Pancasila, namun terkesan gamang atau tidak tegas dinyatakan bahwa pendidikan karakter tersebut adalah bagian dari upaya pengamalan Pancasila. Pelaksanaan pendidikan karakter pun hanya untuk kalangan terbatas, tidak menjangkau untuk seluruh lapisan warga masyarakat.

Pada akhir dekade kedua era reformasi saat ini, tampaknya masyarakat dan bangsa Indonesia disadarkan oleh adanya berbagai fenomena dan kasus yang menimpa seluruh lapisan masyarakat dari lapisan elit sampai lapisan masyarakat terkecil. Istilah yang muncul hasil simpulan karena nilai-nilai Pancasila tidak lagi dipahami dan diamalkan, seperti lunturnya nilai-nilai nasionalisme, lemah mental, mahalnya nilai jujur, rapuhnya karakter. Sebutan ini muncul karena hasil analisis terhadap sejumlah kasus namun telah berkembang secara masif bahkan ditunjukkan oleh kalangan elit sendiri sehingga ada yang dicontoh oleh bawahannya.

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia sedang dalam kondisi darurat yang memerlukan upaya dan tindakan segera sehingga bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lima materi bahasan berupa pertanyaan

yang diajukan dan sekaligus diuraikan jawabannya sebagai berikut.

1. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah eksistensi Pancasila dan pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini? Bagaimana pula dinamika kedudukan dan implementasinya?
2. Apa yang menjadi urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya menegaskan kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimanakah upaya merekonstruksi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila? Perlukah adanya upaya melakukan ideologisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan?
4. Sehubungan dengan adanya pandangan bahwa negara memerlukan haluan negara sebagai pedoman pembangunan, bagaimana mensinergikan nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara sehingga konsep haluan negara dapat menterjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
5. Bagaimanakah langkah-langkah strategis bagi upaya penegakan Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Uraian Pembahasan

Dasar dan Ideologi Negara Pancasila sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Eksistensi Pancasila dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila pertama kali diperkenalkan sebagai dasar negara oleh para penggali atau perumusny melalui pengusul perorangan dalam sidang BPUPKI-PPKI dan kelompok (Noor Syam, 2000; Darmodiharjo, 1984; Darmodiharjo, dkk., 1991). Para pengusul perorangan dalam sidang BPUPKI terdiri atas: (1) Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan dan tulisan pada tanggal 29 Mei 1945; (2) Prof. Dr. Mr. Soepomo yang mengusulkan dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945; dan (3) Ir. Soekarno yang mengusulkan secara lisan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara diusulkan pula oleh kelompok yakni: (1) Panitia 9 yang menghasilkan Naskah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) tanggal 22 Juni 1945, dalam Panitia 9 ini ada Mr. Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno sebagai bagian dari anggota Panitia 9; dan (2) Panitia Hukum Dasar Negara yang merumuskan Hukum Dasar Negara yang disepakati 14 Juli 1945 (Noor Syam, 2000). Dikemukakan oleh Noor Syam (2000:40) bahwa “Mereka yang mengakui bahwa Pancasila dasar negara RI yang sah,

dan yuridis konstitusional, ialah yang diterima dan disahkan secara resmi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karenanya hari lahir (resmi) dasar negara Pancasila ialah 18 Agustus 1945”.

Pada satu tahun terakhir, hari lahir Pancasila telah diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Oleh karena itu, setiap 1 Juni dinyatakan sebagai hari libur nasional dan Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Berbagai reaksi pun muncul baik pro maupun kontra dari berbagai kalangan bahkan dari pakar Hukum Tata Negara, namun tidak sedikit juga yang tidak mempedulkannya. Meskipun demikian, yang perlu diwaspadai jangan sampai energi habis hanya untuk memperdebatkan hari lahir Pancasila padahal ada hal yang lebih penting lagi, yakni memikirkan tentang bagaimana agar Pancasila yang sudah lama kurang mendapat perhatian bahkan banyak praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara mendapat perhatian yang lebih sungguh-sungguh.

2. Dinamika Kedudukan dan Implementasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara

telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa ... negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dst... Pada bagian akhir kalimat alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ini memang tidak ada tertulis kata "Pancasila" namun yang dijadikan dasar tersebut substansinya atau isi rumusan merupakan sila-sila Pancasila yang sah dan yang saat ini berlaku.

Dalam perkembangannya selama 72 tahun sejalan dengan usia Indonesia merdeka, kedudukan Pancasila telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa Orde Lama, Pancasila pernah direkayasa oleh Bung Karno menjadi Tri Sila. Menurut Bung Karno Pancasila dapat disederhanakan menjadi tiga sila: (1) Sosio kebangsaan/nasionalisme; (2) Sosio kerakyatan/demokrasi; dan (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Tri Sila ini dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yakni Gotong royong. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto bertekad untuk kembali kepada Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan resmi yang disahkan oleh PPKI. Orde Baru merumuskan visi programnya ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, Pemerintahan Orde Baru berhasil membawa programnya masuk dalam GBHN dan program penerapan Pancasila oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu ketetapan MPR, yakni Ketetapan

MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Selanjutnya, dibentuk pula sebuah badan Pembina yang dinamakan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP7. Dibawah koordinasi BP 7 inilah proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan Pancasila (P4) dilaksanakan dengan sejumlah kelebihan dan kekurangannya yang akhirnya dibubarkan pada akhir kekuasaan Pemerintahan Orde Baru. Setelah dibubarkannya BP7, belum pernah dibentuk lagi badan pengganti yang dapat melakukan pembinaan terhadap rakyat Indonesia untuk pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sampai dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Bagaimana kinerja dari Tim UKP PIP yang telah berusia 3 bulan?

Urgensi dan Kebutuhan Bangsa Indonesia Dalam Upaya Menegaskan Kedudukan Pancasila Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat negara dalam sistem hukum khususnya dalam hukum dasar tentu sangat penting bagi kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, kedudukan Pancasila telah sangat

kelas walaupun mungkin kurang tegas dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Secara yuridis-konstitusional, kedudukan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Notonagoro ini sangat kuat karena Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalenorm*), sebagai asas kerokhaniaan negara dan norma dasar (*Grundnorm*) atau norma tertinggi dalam suatu negara (Noor Syam, 2000). Apabila ada rekayasa terhadap rumusan Pembukaan UUD 1945 dengan dalih "penegasan" maka dikhawatirkan akan menabrak pernyataan Prof. Dr. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis I Universitas Airlangga di Surabaya 10 November 1955 dan telah menjadi konsensus nasional. Pernyataan tersebut sebagai berikut: "Bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah (diperbaiki) oleh siapapun, dan lembaga apapun, dan dengan jalan bagaimanapun, termasuk dengan jalan hokum (MPR hasil pemilu). Karena, merubah Pembukaan berarti merubah dasar negara; ini berarti pula membubarkan negara (mengkhianati negara Proklamasi).

Sistem Hukum Indonesia

1. Upaya merekonstruksi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila

Upaya penegakan hukum di Indonesia merupakan unsur dari sistem hukum nasional yang selalu mendapat perhatian masyarakat mengingat aspek ini masih menjadi titik yang paling lemah. Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara (DPR) guna mendukung upaya pembangunan nasional, seyogianya ditindaklanjuti oleh upaya penegakan hukum yang baik yang sejalan dengan nilai-nilai dan filsafat negara Pancasila. Acuan atau landasan dasar negara dan ideologi bangsa ini hendaknya bukan hanya berhenti pada tataran konseptual dalam bunyi peraturan melainkan harus diwujudkan dalam proses penerapan aturan tersebut. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus betul-betul menjadi pedoman setiap aparatur penegak hukum dalam proses penyelenggaraan negara. Bagaimana sistem hukum yang didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita pembangunan sistem hukum yang ideal.

2. Upaya melakukan ideologisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sistem hukum nasional, selayaknya semua peraturan perundang-undangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sejalan dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mungkin hingga saat ini masih ada sekelompok komponen bangsa yang masih enggan mencantumkan ideologi Pancasila sebagai ideologi ormasnya. Namun, seandainya memang ada maka upaya sosialisasi dan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi perlu terus dilakukan bahkan intensitasnya perlu ditingkatkan. Pancasila sebagai ideologi hendaknya perlu terus dikaji dari satu generasi kepada generasi mengingat setiap generasi memiliki perbedaan karakteristik dan jaman serta tuntutan dan tantangan kehidupan yang berbeda-beda. Alexis de Toqueville, negarawan Perancis yang hijrah ke Amerika Serikat, menyatakan "*The habits of the mind, as well as 'habits of the heart', the dispositions that inform the democratic ethos, are not inherited.*" (Branson, 1999:2) Artinya, kebiasaan pikiran dan juga 'kebiasaan hati' yakni watak yang menginformasikan demokrasi tidak diturunkan/diwariskan. Dengan kata lain, seorang Bapak yang demokratis belum tentu melahirkan seorang anak yang demokratis apabila anak itu tidak belajar demokrasi.

Untuk menjadi seorang demokratis perlu proses pendidikan dan pembelajaran. Demikian pula untuk membentuk seorang warga negara Indonesia yang Pancasila, maka setiap generasi warga negara perlu belajar Pancasila dan dipraktikkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari.

Proses ideologisasi Pancasila perlu dilakukan dalam peraturan perundang-undangan namun sosialisasi melalui pendidikan perlu dilakukan sejak dini. Nilai-nilai Pancasila perlu terus dikaji sehingga akan memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan tuntutan dan tantangan kehidupan namun tidak keluar/ menyimpang dari pesan yang menjadi nilai-nilai dasar seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Haluan negara sebagai pedoman pembangunan

1. Mensinergikan nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara sehingga konsep haluan negara dapat menterjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Haluan negara dalam sebuah negara sangat penting karena haluan negara akan menjadi arah pembangunan dan wahana serta strategi untuk mencapai visi atau cita-cita sebuah bangsa. Apa dan bagaimana sebuah bangsa seharusnya bekerja untuk mencapai keinginan dan mewujudkan cita-

cita di masa depan mungkin untuk 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Namun yang perlu dijaga, pencapaian bahkan cita-cita mulia yang telah ditetapkan oleh para *the founding father* jangan sampai berbelok arah. Pancasila merupakan pedoman nilai dan filsafat untuk pencapaian cita-cita, visi, misi, dan tujuan negara.

Kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa haluan negara sangat potensial terjadinya penyimpangan dari cita-cita dan tujuan negara yang sesungguhnya, yakni tujuan negara yang hakiki yang sesuai dengan pesan, cita-cita, dan amanat para pejuang dan pendiri negara saat berjuang mencapai kemerdekaan. Apakah kebijakan dan penyelenggaraan negara di negara kita ada penyimpangan? Untuk mengidentifikasi hal tersebut dapat kita lihat dan pertanyakan, adakah program pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945? Bagaimana kondisi nyata masyarakat Indonesia, misalnya dalam bidang sosial ekonomi, adakah kesenjangan yang mencolok? Bagaimana pesan/ketentuan dalam UUD NRI 1945 dalam bidang sosial ekonomi?

Dalam buku Indonesia Menggugat karya Bung Karno (1930) dan buku Indonesia Merdeka karya Bung Hatta (1929), ada pemikiran yang sama tentang kondisi Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari

kekuasaan penjajah Bung Karno dan Bung Hatta mencita-citakan sebuah negara Indonesia yang mandiri, negara yang berdaulat, yang mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa direcoki oleh negara/ bangsa lain. Apakah negara kita saat ini sudah betul-betul mandiri secara ekonomi? Bila kita jujur dan bertanya pada diri sendiri juga kepada sesama warga negara, adakah jawaban yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah mandiri secara ekonomi? Kita adalah bangsa yang telah mewujudkan pesan dan ketentuan Pasal 33, 34, dst UUD NRI 1945. Apabila jawabannya belum mencapai apa yang dipesankan dalam ketentuan Pasal 33, 34 dst., apakah ada harapan dalam jangka waktu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi untuk mewujudkannya. Adakah haluan negara yang telah mengarah untuk mencapainya secara terukur? Sudahkah kita belajar dari pengalaman Era Pemerintahan Orde Baru dalam membuat, menjalankan, dan mencapai cita-cita menggunakan haluan negara. Bila sebuah bangsa mampu belajar dari berbagai kesalahan dan mampu memperbaikinya maka Bangsa ini akan benar-benar menjadi Bangsa yang Besar.

Langkah-langkah strategis bagi upaya penegasan Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila diperlukan penegasan

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam UUD NRI 1945, dalam arti untuk memperkokoh dan untuk menghindari adanya keraguan dari semua komponen bangsa hendaknya dijadikan sebagai jalan untuk melangkah lebih jauh dan lebih utama yakni upaya mendidik seluruh rakyat Indonesia agar memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai *way of life* dalam kehidupan sehari-hari terlebih dalam penyelenggaraan negara oleh seluruh aparatur negara.

Langkah strategis yang dapat ditempuh dari sudut pandang disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bahwa ada empat dimensi PKn sebagai disiplin terapan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*): (1) PKn dalam dimensi Kurikuler, yakni pendidikan kewarganegaraan untuk para siswa di sekolah (*school civic*) mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (2) PKn dalam dimensi Sosial Kultural (*community civic*), yakni pendidikan kewarganegaraan untuk anggota masyarakat di luar satuan pendidikan/ sekolah melainkan yang ada dalam komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi kemasyarakatan; (3) PKn dalam dimensi birokrasi atau pemerintahan (*civic for government*), yakni pendidikan kewarganegaraan untuk pembinaan para aparat dan birokrat; dan (4) PKn dalam dimensi ilmiah, yakni sebagai kajian untuk pengembangan keilmuan.

Dari keempat dimensi PKn ini, semua langkah strategis yang dapat ditempuh untuk pengembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Tentu saja dalam pelaksanaan yang lebih operasional, kita dapat belajar dari pengalaman yang telah dijalankan melalui BP7 pada era Orde Baru. Banyak *best practices* yang dapat dilanjutkan dari pengalaman Orde Baru namun ada pula hal-hal yang perlu diperbaiki.

Kesimpulan

Memperkuat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa penting agar ada kepastian yang lebih kokoh, namun implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh semua komponen bangsa hingga budaya hidup berPancasila benar-benar terwujud jauh lebih penting. Kedudukan Pancasila dalam UUD NRI 1945 telah jelas walaupun tidak secara eksplisit atau tegas dinyatakan sebagai dasar negara. Demikian pula dalam proses implementasi, bangsa Indonesia pernah memiliki program penerapan Pancasila dengan landasan yang kuat karena ada pada tingkat ketetapan MPR dengan badan pembina langsung dibawah Presiden RI.

Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dalam UUD NRI 1945 dapat saja dilakukan untuk lebih memperkuat posisi Pancasila namun jangan sampai mengubah makna dan kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalenorm* seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Notonagoro, SH.

Upaya rekonstruksi sistem hukum nasional berlandaskan Pancasila merupakan cita-cita pembangunan sistem hukum yang ideal dan hendaknya terus menerus diperjuangkan agar cita-cita dan tujuan negara dapat terwujud. Upaya ideologisasi Pancasila pun dalam peraturan perundang-undangan patut dilakukan karena untuk membentuk seorang warga negara Indonesia yang Pancasila, maka setiap generasi warga negara perlu belajar Pancasila dan dipraktikkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari dengan acuan norma yang sejalan dengan Pancasila.

Haluan negara yang menjadi arah pembangunan bangsa dan wahana

serta strategi untuk mencapai visi atau cita-cita bangsa dan seluruh rakyat Indonesia perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bersikap dan bertindak.

Langkah strategis yang dapat ditempuh dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan adalah melalui empat dimensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin terapan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*), yakni dimensi kurikuler, sosial kultural, kajian ilmiah, dan birokrasi.

Daftar Pustaka

- Branson, Margaret Stimmann. (1998). *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. http://www.civiced.org/articles_role.html
- Darmodiharjo, Darji. (1984). *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima.
- Darmodiharjo, Darji; Dekker, Nyoman; Pringgodigdo, A.G., dkk. (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hatta, Mohammad. (1929, 1976). *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noor Syam, Mohammad. (2000). *Pancasila: Dasar Negara Republik Indonesia, Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*. Malang: Laboratorium Pancasila, UM.
- Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial Tahun 1930*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Wahab, A.Azis dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabetha.

**MEWUJUDKAN PANCASILA DALAM PERBUATAN:
Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara,
Ideologi Bangsa dan Negara**

Oleh : Karim Suryadi

Abstrak

Mewujudkan Pancasila dalam perbuatan adalah tantangan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan langkah strategis berikut. Kesatu, melembagakan pandangan “kekitaan” yang terjauh dari pandangan sektarian yang mengkotak-kotakan masyarakat antara “kami yang baik dan benar, serta mereka yang buruk dan salah”. Kedua, mewujudkan Pancasila sebagai “jembatan kebangsaan”, yang mempersatukan entitas sosial yang berbeda, mempertemukan kepentingan mereka yang berkuasa dan warga, serta menjauhkan sikap sempit yang menjadikan Pancasila sebagai alat pembenar sikap penguasa, dan palu godam penghukum tindakan masyarakat yang kritis.

Kata kunci: *Pancasila dalam perbuatan, pandangan kekitaan, Pancasila sebagai jembatan kebangsaan.*

Pendahuluan

Secara konstitusional Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Demikian pula Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah mencapai konsensus secara nasional. Dalam konstruksi hukum nasional pun, Pancasila telah diterima sebagai sumber hukum material, sehingga semua produk hukum secara substantif tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini berarti, secara yuridis formal kedudukan Pancasila sudah kuat dan tegas.

Namun kedudukan yang tegas secara yuridis formal bukan berarti persoalan yang menyangkut Pancasila sudah tuntas. Sejarah pemberlakuan konstitusi menunjukkan tak ada satu pun konstitusi yang tidak mengakui Pancasila (meski dengan rumusan yang berbeda), namun dalam praktiknya beberapa kali sistem ketatanegaraan mengalami penyimpangan. Padahal secara teori, pengakuan Pancasila sebagai nilai yang menjwai konstitusi sejatinya menjadi nilai dasar yang melandasi (sekurang-kurangnya dalam hal) penetapan kerangka pemerintahan (*frame of government*), hak asasi manusia, dan pola hubungan antara penguasa dan mereka yang dikuasai.

Meski mengakui Pancasila, Konstitusi RIS menerapkan federalisme. Demikian pula ketika UUDS 1950 berlaku, demokrasi yang dianut adalah liberalisme. Dua contoh ini mengisyaratkan bahwa hubungan Pancasila dan politik tidak seperti busur dan panahnya. Politik tetap liar meski secara formal konstitusi mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Alih-alih

menjadi rujukan dalam menjalankan kekuasaan, praksis politik sering mematahkan kaidah-kaidah moralitas Pancasila.

Ini berarti tantangan hari ini dan masa yang akan datang bukan penegasan Pancasila secara yuridis formal, melainkan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan berarti penegasan secara yuridis formal tidak penting, namun tantangan pengimplementasian Pancasila jauh lebih mendesak. Dalam kalimat sederhana, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan Pancasila dalam perbuatan?

Dalam konteks penegasan Pancasila, konsep implementasi tidak cukup dipahami seperti implementasi kebijakan pada umumnya, yang mensyaratkan adanya tiga elemen kunci, yakni dasar hukum yang menjadi landasan implementasi, implementor, dan pengerahan sumber daya, melainkan mencakup kearifan praktis yang menggabungkan teori, strategi, dan pengalaman dalam mewujudkan Pancasila dalam perbuatan.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah misi kebangsaan. Misi mengimplementasikan Pancasila mengandung dua makna strategis. Kesatu, melembagakan pandangan “kekitaan” yang terjauh dari pandangan sektarian yang mengkotak-kotakan masyarakat antara “kami yang baik dan benar, serta mereka yang buruk dan salah”. Kedua, mewujudkan Pancasila sebagai “jembatan kebangsaan”, mempertemukan kepentingan

mereka yang berkuasa dan warga, serta menjauhkan sikap sempit yang menjadikan Pancasila sebagai alat pembenar sikap pemerintah dan palu godam penghukum tindakan masyarakat yang kritis.

Melembagakan Pandangan “Kekitaan”

Pandangan kekitaan berarti mengutamakan kepentingan umum, sebuah pandangan yang berusaha memadukan kepentingan orang per orang. Pandangan kekitaan bukan saja akan membuat setiap orang merasa diperhitungkan, tetapi juga dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Bukankah *mahfuzat* (peribahasa) mengatakan “setengah kebenaran ada pada pandangan orang lain” ?

Membicarakan Pancasila bukan membahas kepentingan dan persoalan saya, Anda, atau siapa dan kelompok mana pun, melainkan menyangkut hajat kita sebagai warga bangsa. Artinya, bila penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara beserta implementasinya dipandang sebagai kebutuhan, maka ia menjadi kebutuhan kita, seluruh warga bangsa. Dalam konteks penegasan Pancasila, pandangan kekitaan bukan saja dipahami sebagai pandangan yang tidak meletakkan sekat antara “aku” dan “kamu”, melainkan mengandung makna berikut ini.

Kesatu, mengambil pandangan yang menguntungkan (atau sekurang-kurangnya mempertimbangkan) semua pihak dalam proses pembuatan kebijakan

dan pengambilan keputusan. Meskipun masalah-masalah kewargaan (*civic affairs*) amat beragam, namun komitmen sebagai warga bangsa akan menyatukan berbagai keragaman yang ada.

Implementasi pandangan yang menguntungkan semua pihak telah dicontohkan para pemuda yang dengan gagah berani mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Menyadari setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, maka para pemuda bersumpah untuk menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pemilihan bahasa Indonesia menguntungkan semua pihak, meski faktanya kala itu terdapat beberapa orang yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Bahkan sebagian pemuda yang terbiasa berbicara menggunakan bahasa Belanda harus bersusah payah belajar bahasa Indonesia. Adik bungsu Soetomo, pendiri Budi Utomo, yang bernama Sri Soendari, tidak bisa berbicara bahasa Indonesia saat Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 digelar. Namun komitmennya untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud kecintaannya pada Indonesia telah membuatnya belajar sangat keras, sehingga dua bulan kemudian, tepatnya pada Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928, Sri Soendari sanggup berpidato berbahasa Indonesia (Yudi Latif, 2014: 262).

Komitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (yang dalam konstitusi ditetapkan sebagai bahasa negara) tidak membuat sekelompok orang merasa disepelkan, sementara sekelompok lainnya diistimewakan, karena dengan

memilih bahasa Indonesia berarti semua bahasa daerah sama-sama dihormati.

Kedua, memajukan hubungan kesederajatan, kewargaan, dan pertemanan yang tulus. Meski kepentingan yang menjadi hajat hidup personal beragam, namun nilai-nilai etis yang terkandung di dalam Pancasila menghendaki pemajuan persaudaraan. Ketika situasi memaksa berkompetisi pun, nilai-nilai persaudaraan tidak boleh dikesampingkan. Contoh berikut ini (Yudi Latif, 2014: 2) menunjukkan perbedaan politik tidak sampai menghilangkan persaudaraan dan rasa welas asih. Hingga menjelang akhir dekade 1950-an, Mr. Prawoto Mangkusasmito (Wakil Perdana Menteri, 2 April 1952 - 31 Juli 1953; Wakil Ketua I Konstituante, 10 November 1956 - 5 Juli 1959) belum punya rumah, dan masih tinggal di rumah kontrakan yang disewanya sejak 1952. Mendengar Prawoto akan membeli rumah yang selama ini disewanya, I. J. Kasimo (Ketua Partai Katolik), yang memiliki pandangan berbeda dengan Prawoto dalam hal dasar negara pada sidang konstituante, tergerak hatinya untuk membantu. Kebetulan pemilik rumah tersebut adalah zuster Katolik, yakni Tan Kin Liang keturunan Tionghoa yang tinggal di Maastrich Belanda adalah teman Kasimo, sehingga ia membantu mempersuainya hingga akhirnya rumah di Jalan Kertosono Jakarta itu pun bisa dibeli Pak Prawoto pada 20 Maret 1959. Inilah teladan Prawoto dan Kasimo, meski memiliki pandangan politik yang tajam menyangkut dasar negara, namun tidak mengikis persaudaraan dan saling menolong diantara keduanya.

Panasnya siding-sidang konstituante tidak sampai melumatkan “kekitaan” diantara mereka. Sayangnya, para “menak Senayan” mempraktikkan hal yang sebaliknya,

Pancasila Sebagai “Jembatan Kebangsaan”

Perbedaan adalah sisi lain dari Indonesia. Hanya pandangan yang mempersatukanlah yang dapat menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebuah pandangan komprehensif dan empatik, bukan pandangan parsial dan parokialistik.

Gambaran Pancasila sebagai jembatan kebangsaan yang mempersatukan dicontohkan oleh Soekarno. Apa pun persoalan yang mengemuka selalu dipahami dalam konteks keindonesiaan. Soekarno menunjukkan pandangan ini dalam pidatonya berjudul “Aku Melihat Indonesia”. *Jikalau aku berdiri di Pantai Ngliep/Aku mendengar Lautan Hindia bergelora/Membanting di Pantai Ngliep itu/Aku mendengar lagu, sajak Indonesia// Jikalau aku melihat/sawah-sawah yang menguning menghijau/aku tidak melihat lagi/batang-batang padi yang menguning menghijau/aku melihat Indonesia//...Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku/ bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio/ aku mendengar Indonesiaa...”*

Sudut pandang keindonesiaan seperti dicontohkan Soekarno memberi pelajaran bahwa sudut pandang dan pola pikir keindonesiaan harus menjiwai seluruh kebijakan yang diambil

pemerintah, atau pendekatan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kebangsaan. Bila pemerintah berjanji mendorong toleransi, maka janji itu harus tercermin dari kebijakan yang peka terhadap keragaman budaya daerah, sehingga kemunculan kebijakan tersebut tidak menjadi kekuatan sentrifugal yang mendorong perpecahan.

Secara teori pandangan keindonesiaan yang mempersatukan hanya akan tumbuh bila ikatan kebangsaan diletakkan pada faktor kemauan, atau apa yang disebut sebagai nasionalisme subjektif oleh Ernest Renan. Menurut teori ini, bangsa tidak tumbuh di atas kesamaan objektif (seperti sejarah, bahasa, warna kulit, agama, dan kesamaan lain yang tampak), melainkan dibangun di atas kemauan untuk hidup sebagai warga bangsa. Kemauan inilah yang melintasi perbedaan yang ada, dan kemauan untuk menjadi warga bangsa yang satu melebihi kecintaan pada faktor-faktor objektif yang berbeda satu sama lain.

Ini berarti pandangan keindonesiaan memahami betul hal-hal unik yang menjadi pembeda, sekaligus kemampuan mencari titik temu. Kuncinya ada pada kemampuan untuk keluar dari pengalaman dan sudut pandang subjektif, dan peka terhadap pandangan orang lain. Pandangan mempersatukan tercermin dari wawasan nusantara sebagai pendekatan dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Laut yang secara kasat mata menjadi pemisah antara pulau yang satu dengan yang lainnya dipandang sebagai penghubung yang mempersatukan.

Dalam komunikasi sehari-hati, pandangan ini berarti kemampuan memilih kosa kata dan mengambil sikap dari sisi yang menghubungkan orang-orang per orang ke dalam situasi yang memungkinkan terjadinya perjumpaan pemikiran. Kemampuan ini hanya akan tumbuh bila seseorang bisa keluar dari jebakan etnosentrisme (sebuah pandangan yang hanya bertumpu pada budaya sendiri).

Untuk keluar dari jebakan etnosentrisme dibutuhkan dua hal berikut. Kesatu, perubahan sikap dihasilkan karena penambahan informasi, perubahan afiliasi kelompok individu, perubahan perilaku terhadap objek, dan prosedur yang dapat mengubah kepribadian. Kedua, arah dan tingkat perubahan sikap yang disebabkan penambahan informasi merupakan fungsi dari faktor-faktor situasional, sumber informasi, media informasi, bentuk, dan isi informasi (Krech, 1967).

Ini berarti habituasi pandangan yang toleran terhadap perbedaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Seperti halnya toleransi itu sendiri, kepekaan terhadap entitas budaya adalah perilaku yang dipelajari, bukan dibawa sejak lahir.

Implementasi tentang Pancasila sebagai jembatan budaya bukan hanya membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, melainkan kearifan praktis yang memadukan ketiganya dan membawanya ke dalam tindakan nyata. Berikut adalah contoh kearifan praktis dimaksud (Davis, 2016):

Cecil B. DeMile (1881-1959), adalah sutradara film Hollywood ternama. Dari tangannya telah lahir film-film kolosal Cleopatra dan Samson and Delilah, dengan dekor kolosal dan adegan yang melibatkan ribuan orang. Sebagai sutradara yang dihormati, tidak sulit baginya membuat sekumpulan aktor kondang mendengarkan dan mematuhi apa pun perintahnya untuk adegan tertentu. Namun ketika membuat film Eksodus (peristiwa keluarnya seluruh bangsa Israel dari tanah Mesir), De Mille yang kala itu berusia 75 tahun menghadapi tantangan. Ketika tengah memberi instruksi kepada kerumunan ratusan figuran yang berpakaian seperti budak, di tengah sengatan terik matahari, DeMile melihat seorang wanita muda di kerumunan belakang malah mengobrol dan tak menghiraukan arahan DeMile, padahal saat itu sedang pengambilan gambar untuk sebuah adegan paling menantang. DeMile jengkel melihat kejadian itu, dia menghentikan pemberian arahan, lalu berteriak dari atas panggung: "Wanita muda di sana, bersediakah kau berbagi apa yang harus kau katakan dengan kita semua?"

"Ya", wanita itu berteriak, "Saya bertanya-tanya kapan bajingan botak itu akan meneriakkan makan siang?"

Suasana hening yang mencekam menyerga saat itu. Semua orang mencemaskan wanita muda itu, lalu menoleh kepada sang sutradara senior yang mengesankan namun jelas botak. DeMile menurunkan pengeras suara dan menunduk memandangi kakinya sesaat. Lalu dia mengangkat pengeras suara sekali lagi, dan berteriak: "Makan

siang".

DeMile menunjukkan kemampuan untuk memahami seluruh situasi, memutuskan bagaimana bereaksi, dan bertindak dengan cara yang membuat segala sesuatunya berjalan lancar, dan kesemuanya dilakukan dalam hitungan detik. DeMile melakukan sesuatu yang berada di luar skenarionnya. Dia tidak berdebat, atau menimbang-nimbang kemungkinan, namun dengan segera bertindak dalam cara-cara yang berterima dan diyakini menyelamatkan misi dan menjunjung kebaikan bersama.

Penutup

Menghadirkan Pancasila dalam perbuatan menuntut kearifan praktis dalam memadukan teori, pengalaman, dan keterampilan serta mewujudkannya dalam tindakan nyata. Kearifan ini menuntut keberanian dalam menundukan ego sehingga tunduk pada tindakan menghargai orang dan tujuan bersama.

Memajukan pandangan kekitaan dan menjadikan Pancasila sebagai jembatan kebangsaan adalah bentuk habituasi kearifan praktis. Selain memberi teladan dan contoh, mengajarkan Pancasila dalam amalan adalah bentuk lain dari kearifan praktis. Bentuk-bentuk tindakan inilah yang harus dibiasakan dalam pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, agar Pancasila menemukan makna yang sebenarnya, dan bukan sebagai rumusan besar namun terasing dari perbuatan.***

Rujukan

Davis, Jocelyn, 2016, *The Great on Leadership: Classic Wisdom for Modern Managers*, Nicholas Brealey Publishing.

Karim Suryadi, 2016, *Menak Senayan*, Bandung: Pustaka Jaya.

Krech, David, 1967, *Individual in Society*, Berkeley: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.

Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan*, Bandung: Mizan.

MEMBUMIKAN PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER

Kokom Komalasari

(Profesor pada departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia)

Abstrak

Pancasila perlu membumi tidak “berada di atas awan”, sehingga seluruh masyarakat Indonesia ber-Pancasila in action untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia hendaknya memiliki kesatuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Untuk itu perlu pendidikan karakter Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan, sehingga memerlukan communities of character yang terdiri atas keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media, pemerintahan dan berbagai pihak. Pendidikan karakter Pancasila di sekolah dapat dilakukan melalui kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, integrasi dalam kegiatan pembelajaran seluruh mata pelajaran, pengembangan budaya sekolah (habitiasi), dan kegiatan ekstrakurikuler, serta membangun kerjasama dengan masyarakat. Praktek pendidikan karakter Pancasila didukung dengan pemberian keteladanan pemimpin, budaya teguran dan penghargaan.

Keyword: Pancasila, pendidikan, karakter, pendidikan karakter

Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai karakter Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai karakter Pancasila; (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; (5) ancaman disintegrasi bangsa; dan (6) melemahnya kemandirian bangsa (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Permasalahan kritis di atas berdampak pula terhadap munculnya kecenderungan demoralisasi pada generasi muda Indonesia yang ditandai dengan: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk; (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) menurunnya etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara; (9) membudayanya ketidakjujuran; dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (Megawangi, 2004:9-11).

Muara dari munculnya permasalahan tersebut di atas adalah lemahnya pemahaman, kesadaran, dan pembiasaan perilaku sesuai karakter Pancasila pada seluruh kalangan

masyarakat terutama pada generasi muda seiring dengan perkembangan globalisasi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu kesatuan pemahaman, sikap dan pengamalan Pancasila, sehingga Pancasila tidak “ngawang-ngawang” (seolah jauh di atas langit) tetapi membumi, artinya Pancasila menjadi pribadi bangsa yang tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari pada seluruh aspek kehidupan (Saripudin, 2010).

Oleh karena itu perlu membumikan Pancasila melalui pendidikan karakter Pancasila. Pada makalah ini akan dikaji tentang: 1) bagaimana kesatuan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui Pendidikan; 2) bagaimana membumikan Pancasila melalui Pendidikan karakter Pancasila.

Keutuhan Pemahaman, Kesadaran, dan Pengamalan Pancasila

Terdapat beberapa cara pemahaman Pancasila secara utuh untuk dijadikan rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: *Pertama*, perlu kesatuan pemahaman antar komponen bangsa (pemerintah, masyarakat umum, politis, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat mengenai Pancasila secara filosofis, ideologis, dan historis. *Kedua*, setelah kesatuan pemahaman filosofis, ideologis, historis tersebut, maka harus juga diikuti dengan kesatuan pemahaman pada tataran

instrumental yuridis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan kesatuan pemahaman pula secara praktis (*in action*) dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dulu kita mengenal 36 butir Pancasila yang merupakan penjabaran perilaku ber-Pancasila pada masing-masing sila. Dimana sedikit banyak kita memperoleh gambaran pemahaman yang sama tentang nilai-nilai praksis Pancasila, yang tentunya harus diikuti dengan kesatuan kesadaran nilai dan pengamalannya.

Kesatuan pemahaman ini bukan berarti menghilangkan keberagaman Indonesia, tetapi perlu ditekankan bahwa Pancasila harus membumi di tanah Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga dapat menjadikan Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yang tercermin dalam keseluruhan pengetahuan, sikap, dan pola perilaku seluruh bangsa Indonesia.

Pancasila menjadi pribadi bangsa mengandung makna bahwa Pancasila harus menjadi karakter bangsa Indonesia. Karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (*an individuals pattern of behavior ... his moral contitution*) (Bohlin et.al, 2001: 1). Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau

norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Komalasari (2007) mengidentifikasi nilai karakter yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

- a. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa* mengandung nilai-nilai religius yang menunjukkan bahwa: 1) Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, Yang Maha Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya; 2) Tuhan ada secara mutlak; 3) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; 4) negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing; 5) warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama; 6) kehidupan yang diliputi oleh toleransi antarumat seagama maupun antaraumat beragama mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan.
- b. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab* mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menunjukkan bahwa: 1) manusia memiliki hakekat pribadi yang satu kemajemukan; 2) manusia terdiri dari susunan kodrat jiwa dan raga; 3) manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; 4) manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini

adanya prinsip persamaan harkat, derajat dan martabat sebagai hamba Tuhan, serta menegakan prinsip keadilan terhadap sesama manusia; 5) manusia beradab adalah yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

- c. *Sila Persatuan Indonesia* mengandung nilai-nilai persatuan yang menunjukkan bahwa: 1) persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia; 2) bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia; 3) adanya pengakuan terhadap ke-“Bhinneka Tunggal Ika-an” suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; 4) nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan merupakan suatu kenyataan yang dinamis.
- d. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* mengandung nilai-nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa: 1) kedaulatan negara adalah di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan; 2) kerakyatan dikendalikan oleh hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; 3) manusia Indonesia sebagai warga negara dari warga

masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; 4) musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat; 5) musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi

- e. *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* mengandung nilai-nilai keadilan yang menunjukkan bahwa: 1) perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia; 2) keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional; 3) cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia; 4) adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati orang lain; 5) bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan; 6) tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas; 7) harkat, derajat dan martabat manusia dijunjung tinggi; 8) adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain; 9) adanya penolakan terhadap tindakan kesewenang-wenangan serta pemerasan terhadap sesama.

Dalam proses membangun kesamaan pemahaman dan pengamalan

nilai karakter Pancasila, maka perlu ditekankan tentang pentingnya: Pertama, **Pancasila in Action**, Artinya Pancasila tidak sebatas dipahami dan dihayati (kecenderungan berperilaku), tetapi lebih pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila bukan retorika belaka seperti P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada masa Orde Baru atau hanya dihadirkan secara sloganistik seperti “Melaksanakan Pancasila secara Murni dan Konsekuen” dan “Saya Pancasila”. Tetapi dalam realita kehidupan tidak nampak pencerminan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu pendidikan karakter Pancasila tidak hanya *moral knowing* dan *moral feeling*, tetapi yang lebih penting adalah *moral action*. Lickona (1992: 51) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik dimana “*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good-habits of the mind, habits of the heart, and habits of action*”. Artinya, karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai atau menginginkan kebaikan (*loving or desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*acting the good*). Oleh karena itu, cara membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. Artinya Pancasila bukan hanya dipahami nilai-nilainya dan dihayati sebagai kecenderungan perilaku, tetapi diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sebuah pembiasaan perilaku ber-Pancasila (Pancasila Membumi).

Kedua, **Keteladanan pengamalan Pancasila**, Artinya pemimpin negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, public figure, orang tua memberikan contoh/teladan yang baik dalam pengamalan Pancasila. Pada masyarakat Indonesia yang digambarkan Koentjaraningrat (1983) memiliki sifat paternalistis, maka perilaku bapakisme sangat nampak. Hal ini mengindikasikan perilaku orang-orang yang dianggap sebagai bapak (pemimpin pada masing-masing lingkungannya) akan menjadi contoh/teladan bagi masyarakat bawahan/lebih muda. Oleh karena para pemimpin perlu memberikan contoh teladan yang baik, di saat kondisi menunjukkan miskinnya contoh/teladan yang baik.

Ketiga, **Budaya teguran dan penghargaan dalam konteks pengamalan Pancasila**. Tindakan menegur orang yang salah seringkali dianggap turut campur urusan orang lain, sehingga orang yang ditegur menjadi marah dan orang yang menegur menjadi risih/takut. Dalam mengamalkan Pancasila, budaya “teguran” perlu dipraktekkan, karena merupakan modal awal untuk berkembangnya perilaku taat hukum dan penegakan hukum. Tentunya teguran disampaikan dengan cara yang baik dan tepat. Disamping teguran, juga perlu memberikan penghargaan kepada pihak yang melaksanakan Pancasila *in action* dan memberikan keteladanan dalam pengamalan Pancasila.

Strategi Membumikan Pancasila melalui Pendidikan Karakter di Sekolah

Perilaku berkarakter Pancasila dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan (*nurture*) dan factor bawaan (*nature*). Dalam konteks faktor lingkungan sebagai faktor eksternal yang membentuk karakter Pancasila pada bangsa Indonesia, maka pendidikan menjadi sangat penting. Socrates (469-399 SM) menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling mendasar membentuk individu menjadi baik dan cerdas (*good and smart*). "*Goodness is knowledge ... to be good at something is a matter of knowledge*. Plato (428-348 SM), murid Socrates merefleksikan pemikiran gurunya untuk hal yang lebih makro dari sekedar kebajikan individu menjadi negarawan yang baik. Dalam bukunya yang terkenal, *Republic*, ia mengungkapkan idenya tentang pendidikan, bahwa agar anak dapat meraih kebenaran dan kebajikan diperlukan pedoman yang jelas moral agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Aristoteles (384-322 SM), murid Plato juga mengarahkan pendidikan kepada kebajikan atau nilai (*virtue*) individu. Kebajikan atau nilai (*virtue*) itu mengandung dua aspek yaitu intelektual dan moral. "*Intellectual virtue in the main owes both its birth and its growth to teach-ing, while moral virtue comes about as a result of habit*". (Grube: 1980: 216-217).

Dewantara (1962), tokoh pendidikan Indonesia menegaskan hakikat pendidikan adalah daya-upaya untuk

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar, cerdas dan bertubuh sehat. Citra manusia Indonesia yang akan dibentuk melalui pendidikan sebagai berikut: 1) manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan citra manusia di Indonesia menjadi berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran; 2) manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi (tahu banyak dan banyak tahu) dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya; 3) manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, tapi lebih-lebih memiliki pengetahuan yang benar tentang fungsi-fungsi tubuhnya dan memahami fungsi-fungsi itu untuk memerdekakan dirinya dari segala dorongan ke arah tindakan kejahatan.

Pendidikan Karakter ini merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Pendidikan karakter di Indonesia

bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, kepribadian bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu pendidikan karakter Pancasila.

Pendidikan karakter Pancasila erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. Karena pendidikan karakter Pancasila merupakan suatu habit, maka pembentukan karakter Pancasila pada masyarakat Indonesia itu memerlukan *communities of character* yang terdiri atas keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media, pemerintahan dan berbagai pihak. Semua *communities of character* tersebut hendaknya memberikan suatu keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, dan penguatan. Dengan kata lain pembentukan karakter Pancasila memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan.

Peran sekolah dalam Pendidikan karakter Pancasila dalam konteks *communities of Character*, diletakkan di tengah. Sehingga dalam konteks ini tidak salah Lockwood (1997) mendefinisikan pendidikan karakter itu sebagai “*any school-initiated program, design in cooperation with other community institutions, to shape directly and systematically the behavior of young people by influencing explicitly the nonrelativistic values believed to bring about that behavior*”. Dengan demikian peran sekolah sebagai *communities of character* dalam pendidikan

karakter sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan bekerjasama dengan keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya. Sekolah menjadi jembatan penghubung pendidikan karakter di satuan pendidikan dengan keluarga-masyarakat melalui kontekstualisasi nilai kehidupan sehari-hari siswa dalam pembelajaran, serta pemberdayaan lembaga komite sekolah sebagai wahana partisipasi orang tua-masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan karakter. Di samping itu, pendidikan karakter memang harus mulai dibangun di rumah, dan dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah, bahkan diterapkan secara nyata di dalam masyarakat dan bahkan termasuk di dalamnya adalah dunia usaha dan dunia industri.

Terkait dengan Pendidikan Karakter Pancasila di sekolah, maka beberapa hal dapat dilakukan:

- a. Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan, dari TK sampai PT dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Hal ini mengindikasikan perlunya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga integrasi nilai-nilai Pancasila pada seluruh mata pelajaran secara tidak langsung. Belajar dari China yang membentengi ideologinya dari serbuan ideologi liberal dengan membentengi generasi muda diantaranya melalui pembaharuan kurikulum pada tahun 2000 yang

lebih berorientasi pada Pendidikan karakter yang bersumber pada pendidikan ideologi (Lanqing, 2003), sehingga sejak TK sampai perguruan tinggi siswa dibekali dengan pendidikan ideology yang disajikan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bahkan di China pada jenjang perguruan tinggi mata kuliah wajib umum meliputi beberapa label mata kuliah pemahaman dan penerapan ideologinya pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya sosialisme dalam ekonomi, dan sosialisme dalam sosial budaya. Disamping itu, sejak SD, siswa di China wajib mengikuti praktikum dengan label program *practical integrated* untuk mempraktekkan pengamalan ideologinya melalui keterpaduan antara pengembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi (tuntutan di era global) dengan *service learning* kepada masyarakat (praktek sosialisme) (Xiaoman, 2006).

- b. Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas pada semua mata pelajaran, artinya nilai-nilai karakter Pancasila dibiasakan secara praktis penerapannya di kelas, misalnya pembelajaran diawali dan diakhiri dengan doa, belajar dengan sungguh-sungguh, musyawarah dalam melaksanakan diskusi kelompok, gotong royong bertugas piket, pemilihan ketua kelas secara demokratis, kerjasama dan bersatu, menghargai perbedaan kemampuan siswa,

kepedulian sosial terhadap teman, bertanggung jawab dalam belajar, jujur, dan sebagainya yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Komalasari dan Saripudin, 2017)

- c. Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya sekolah. Artinya nilai-nilai karakter Pancasila harus tercermin dalam budaya sekolah melalui kegiatan berikut:

- 1) Kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara hari senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, beribadah bersama atau salah berjamaah setiap dhuhur (bagi yang beragama islam), berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, dan teman.
- 2) Kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa secara spontan pada saat itu juga. Misalnya menegur ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, meleraikan jika ada yang berkelahi, menegur jika ada siswa yang tidak sopan dalam berkata, berbuat, dan berpenampilan. Disamping itu kegiatan mengumpulkan sumbangan dana ketika

ada siswa lain yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.

- 3) Keteladanan, yaitu perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan juga siswa dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. Misalnya nilai disiplin, kebersihan dan kerapian, kesopanan, kasih sayang, perhatian, jujur, dan bekerja keras.
- 4) Pengkondisian, yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster ka-

ta-kata bijak yang dipajang di lorong sekolah dan di dalam kelas. Kegiatan ekstrakurikuler

(Komalasari dan Saripudin, 2017)

- d. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan di dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk pada waktu hari libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Nilai-nilai Pancasila yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Karakter Dominan yang Dikembangkan melalui Ekstrakurikuler

No	Jenis Ekstrakurikuler	Bentuk Ekstrakurikuler	Karakter dominan yang dikembangkan
1	Krida	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepramukaan 2. Latihan Kepemimpinan Siswa 3. Palang Merah Remaja 4. Usaha Kesehatan Sekolah 5. Pasukan Pengibar Bendera 6. Polisi kemaanan Sekolah, dan lainnya 	Semangat kebangsaan, cinta tanah air, disiplin, peduli sosial, peduli lingkungan, kesederhanaan, demokratis, tanggung jawab.
2	Karya ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Ilmiah Remaja 2. Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, misal English Club, Sains Club, Social Science Club. 3. Penelitian, dan lainnya 	Kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, cinta ilmu menghargai prestasi, tanggung jawab, dan komunikatif.

3	Latihan olah-bakat latihan olah-minat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bakat olahraga 2. Seni dan budaya, 3. Pecinta alam, 4. jurnalistik, 5. teater, 6. teknologi informasi dan komunikasi, 7. rekayasa, dan lainnya 	Disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan, cinta damai, bersahabat, dan komunikatif,
4	Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pesantren kilat, 2. ceramah keagamaan, 3. baca tulis alquran, 4. retreat dan lainnya 	Religius, jujur, toleransi, mandiri, dan cinta damai
5.	Kegiatan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar 2. Pelatihan 3. dan lainnya 	rasa ingin tahu, gemar membaca, cinta ilmu

Sumber: Komalasari dkk (2014)

- a. Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat (berbasis komunitas), dilakukan melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas di luar lembaga pendidikan sebagai sumber-sumber pembelajaran, tempat berbagi pengalaman dan keterampilan yang memperkuat penumbuhan karakter peserta didik. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai pihak sebagai berikut:
- 1) Orang tua, melalui membangun komitmen, konsistensi, komunikasi, finansial, dan berbagi pengetahuan.
 - 2) Komite Sekolah, melalui mediasi, mobilisasi sumber daya, dan pengawasan,
 - 3) Dunia usaha, melalui Corporate social responsibility/CSR (Tanggung jawab sosial perusahaan) , sumber belajar, media massa,
 - 4) Akademisi dan pegiat pendidikan, melalui partisipasi, advokasi, literasi, dna program inovasi.
 - 5) Pelaku Seni & Budaya, Bahasa & Sastra, melalui sumber belajar, museum, taman budaya, komunitas bahasa, dan sanggar seni.
 - 6) Pemerintah & Pemda, melalui kolaborasi sumber daya dari instansi
- (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa hendaknya dipahami secara utuh, dan bangsa Indonesia hendaknya memiliki kesatuan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila dan nilai-nilai karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan sekolah memegang peran penting dalam membumikan Pancasila melalui integrasi Pancasila dalam Pendidikan Karakter di sekolah melalui: 1) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran di kelas dan luar kelas; 3) menjadi budaya

sekolah (habitiasi); 4) di dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai karakter Pancasila; dan 5) menjalin kerjasama sekolah dan masyarakat dalam pengembangan karakter Pancasila.

Rekomendasi

Untuk membumikan Pancasila, maka terdapat beberapa rekomendasi: 1) Pancasila in action seluruh masyarakat Indonesia; 2) Pemimpin memberikan keteladanan dalam perilaku ber-Pancasila; 3) Pembiasaan perilaku “berani menegur” yang salah dan memebrikan penghargaan terhadap yang benar dalam konteks pengamalan Pancasila.

Referensi

- Bohlin, K.E., Farmer, D., & Ryan, K. (2001). *Building Character in School Resource Guide*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Dewantara, Ki Hadjar. (1962). *Karya Bagian I: Pendidikan*, Yogyakarta: MLPTS.
- Grube, G.M.A. (1980). *Plato`s Thought*. Hacket Publishing Company, Inc.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Koentjaraningrat. (1983). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komalasari, K. (2007). *Pendidikan Pancasila: Buku Acuan Utama untuk Para Politisi, Para Guru dan Mahasiswa Calon Guru PKn*. Surabaya: Lentera Cendekia.
- Komalasari, K. Saripudin, D., & Masyitoh, I.M. (2014). Living Values Education Model in Learning and Extracurricular Activities to Construct the Students' Character. *Journal of Education and Practice*. 5 (7): 166-174.
- Komalasari, K. dan Saripudin, D. (2017). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasi Living Values Education*. Bandung: Refika Aditama
- Lickona, T. (1992). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
- Lockwood. (1997). *Character Education: Controversy and Consensus*. Corwin Press. Thousand Oaks CA.
- Lanqing, L. (2003). *Education for 1.3 Billion*. Pearson Education, Foreign Language Teaching and Research.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter (Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Karakter Bangsa)*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Saripudin, D. (2010). *Membumikan Pancasila*. Dalam [www.jabar today](http://www.jabar.today). Diakses 18 September 2016.
- Xiaoman. Z. (2006). Moral Education and Values Education in Curriculum Reform in China. *Front. Educ.China*, 2: 191-200.

MEMPERKOKOH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DALAM MEMBANGUN WARGANEGARA BERKARAKTER DI ERA GLOBAL

Oleh :
Syaifullah, S.Pd., M.Si

Abstrak

Era globalisasi tidak saja menghadirkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, melainkan secara simultan menghadirkan berbagai ekses negatif yang tidak dapat diprediksi (unpredictable). Diperlukan kompetensi warganegara yang mampu menyikapi berbagai persoalan globalisasi tersebut secara bijaksana, baik kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mumpuni, yang akan mampu menjawab berbagai persoalan globalisasi yang mengemuka.

Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia merupakan pilihan ideologi yang sangat tepat yang mesti dijadikan rujukan utama bagi setiap warganegara dalam bertindak dalam konteks global. Hal ini tidak lain agar sikap dan perilaku yang ditampilkannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, sikap dan perilaku berkarakter Pancasila, yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : Pancasila, ideologi bangsa, warganegara, global.

Pendahuluan

Saat ini, masalah karakter menjadi topik pembicaraan hangat. Di mana-mana orang membicarakan dan mengupas serta mencari solusi yang tepat implementasi pendidikan karakter tersebut. Tidak hanya di kampus melainkan di berbagai tempat, tak habis-habisnya masalah karakter dibahas, dikaji dalam berbagai perspektif.

Tidak kurang dari Presiden SBY, dalam pidato Hardiknas tahun 2010 di Istana Negara tanggal 11 Mei 2010, Presiden mengemukakan 5 (lima) isu penting dalam dunia pendidikan, yaitu (1) hubungan pendidikan dengan pembentukan watak atau *character building*; (2) kaitan pendidikan dengan kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah seseorang selesai mengikuti pendidikan; (3) kaitan pendidikan dan lapangan pekerjaan; (4) membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*); dan (5) membangun budaya inovasi atau *the culture of innovation*.

Pada kesempatan tersebut, khusus mengenai pentingnya membangun karakter. Lebih lanjut Presiden SBY mengatakan:

“...membangun karakter (character building) tentu bukan hanya tugas dunia pendidikan, melainkan tugas bangsa secara keseluruhan. Yang disebut berkarakter kuat dan baik adalah baik perseorangan atau masyarakat atau bahkan bangsa adalah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. “... yang ulet, tegar, tidak mudah menyerah, tidak cengeng dan gigih mengatasi masalah. Dan

mereka yang toleran terhadap yang lain, menghargai yang lain, rukun dengan saudara-saudaranya, dan perlunya menjaga patriotisme dan nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa”.

Mencermati apa yang dikemukakan oleh Presiden SBY di atas, nampaknya menekankan nilai-nilai karakter yang mesti diwujudkan oleh setiap warga negara, terlebih dalam era global saat ini yang penuh dengan tantangan yang sangat berat sekaligus berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam konteks itu, maka dalam artikel ini, penulis akan mencoba mengelaborasi tiga hal penting, yaitu : *Pertama*, bagaimana sosok warganegara berkarakter di era global? *Kedua*, mengapa warga negara berkarakter di era global itu penting? Dan yang *ketiga*, upaya mewujudkan warga negara berkarakter di era global melalui PKn yang berwawasan global.

Bagaimana Karakteristik Warganegara Berkarakter di Era Global?

Untuk menjawab pertanyaan itu, patut disimak pendapat yang dikemukakan Korten (1993), bahwa warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Sifat khas seorang warga negara yang bertanggungjawab terlihat dari komitmennya terhadap nilai-nilai integratif dan terhadap penerapan aktif kesadaran kritisnya : kemampuan untuk berpikir mandiri,

kritis dan konstruktif, kemampuan untuk melihat masalah dalam konteks jangka panjang, dan untuk membuat penilaian berdasarkan suatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang. Menurut Korten, dalam melaksanakan warga negara tersebut terdapat sarana yang dipergunakan warga negara untuk menetapkan identitas dan pengakuan sah atau usaha bersama mereka. Sarana tersebut adalah organisasi sukarela yang menyediakan sistem dukungan organisasi dan sarana untuk menggerakkan sumberdayanya untuk upaya-upaya yang menuntut lebih dari tindakan individual.

Istilah warga negara global yang dikemukakan Korten, merupakan istilah yang menunjuk kepada tingkatan kewarganegaraan. Warga negara global merupakan tingkatan lebih lanjut dari tingkatan warga negara komunal, dan warga negara nasional.

John Cogan memberikan beberapa karakteristik warga negara yang dikaitkan dengan kecedeuangan global yang terjadi saat ini. Karakteristik tersebut meliputi :

- Mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global.
- Bekerja bersama dengan orang lain.
- Bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat.
- Berpikir secara kritis dan sistematis.
- Menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan.
- Mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan.
- Menghormati dan mempertahankan

hak asasi.

- Berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat pembelajaran civics; dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi.

Sementara itu, menurut pendapat Kanter sebagaimana dikutip Wisnubrata (2001), menyebutkan ada tiga ciri manusia kelas dunia (*world class*), yaitu konsep (*concept*), kompetensi (*competence*), dan koneksi (*connection*). *Concept* berkaitan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan gagasan-gagasan mutakhir. Sedangkan *competence* berkenaan dengan pengembangan kemampuan untuk bekerja secara multidisiplin. Kemudian, *connection* berhubungan dengan pengembangan jaringan sosial (*social network*) untuk melakukan kerjasama secara informal.

Selanjutnya, Wisnubrata (2001) menambahkan dua syarat lagi untuk melengkapi syarat manusia kelas dunia sebagaimana dikemukakan Kanter. Dua syarat itu adalah kredibilitas (*credibility*), dan kepedulian (*caring*). Kredibilitas berhubungan dengan integritas : jujur, menjalankan apa yang dikatakan (*walk the talk*), memegang teguh janji, berlaku adil, sehingga akan membangun rasa percaya (*trust*), dan rasa hormat (*respect*) dari orang lain. Kemudian kepedulian (*caring*) yakni peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan keadaan orang lain, memberi yang terbaik tanpa pamrih, berbagi pengetahuan dan informasi dalam rangka memperkaya wawasan dan mentalitas (*abundant mentality*).

Berdasarkan pengertian warga negara global sebagaimana

diketengahkan Korten di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa warga negara global adalah warga negara dimana sikap, komitmen, dan tanggung jawabnya mampu melintasi batas-batas budaya setempat baik lokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global. Singkatnya, warga negara global merupakan warga negara lintas negara, warga negara lintas kebudayaan antarnegara, atau warga negara lintas kepentingan secara lebih luas diluar kepentingan individu dan kepentingan institusional bahkan kepentingan nasional.

Mengapa warga negara berkarakter di era global itu penting?

Hal ini tidak lepas dari kenyataan adanya ketergantungan global (*global interdependent*) antarnegara-bangsa dalam menjalin hubungan dengan berbagai bangsa-bangsa lain di penjuru dunia ini. Korten memandang bahwa saling ketergantungan akan menciptakan suatu situasi dimana negara-negara dan penduduk mempunyai kepentingan yang sah dalam urusan masing-masing dan mempunyai hak untuk ikut mempengaruhi urusan-urusan yang melampaui apa yang bisa direstui oleh konsep kedaulatan yang lebih tradisional (Korten, 1993:263). Berdasarkan pendapat tersebut, warga negara global tidak bisa dilepaskan dengan ketergantungan global yang di dalamnya negara-bangsa (*nation-state*) terlibat dalam berbagai kepentingan mereka masing-masing. Warga negara global menurut Korten, berperan sangat penting untuk merumuskan menerapkan

agenda untuk transformasi sosial. Di sinilah peranan jiwa kewarganegaraan global (*mind of global citizen*) dalam mempertautkan dan mempersatukan rakyat di dunia ini untuk bersama-sama melakukan transformasi sosial.

Dari uraian warga negara global sebagaimana dikemukakan Korten, kiranya dapat dipahami bahwa gagasan warga negara berkarakter di era global tersebut berkait erat dengan adanya ketergantungan yang kuat antarnegara di dunia ini, dan karenanya diperlukan keterlibatan warga negara dunia untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi apa pun dari masing-masing bangsa tersebut.

Agar warga negara berkarakter di era global yang terlibat dalam ketergantungan global tersebut dapat memainkan perannya dengan baik, maka tentu saja diperlukan sejumlah kemampuan atau kompetensi yang mendukung ke arah sikap, tindakan, dan perbuatan yang merefleksikan ciri-ciri warga negara global sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Dalam konteks inilah pendidikan global (*global education*) sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi atau kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut.

Perlunya PKn berwawasan Global

Untuk memahami secara komprehensif tentang arti/makna pendidikan global serta kontribusinya terhadap penyiapan kemampuan

warga negara global, maka secara sistematis akan dijelaskan berikut ini tentang makna pendidikan global (*global education*).

Tucker sebagaimana dikutip Sumaatmadja (1995:23) mengatakan bahwa pendidikan global adalah pendidikan yang diarahkan pada pengembangan wawasan global yang mempersiapkan anak didik generasi muda menjadi manusiawi, rasional, sebagai warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan. (*Global Education, commonly referred to as education for a global perspective, is to prepare young people to be humane, rational, participating citizens in the world that is becoming increasing interdependent*).

Sementara itu, dalam pandangan Barbara Benham Tye dan Kenneth A. Tye (1992) pendidikan global merupakan :

Global education involves (1) the study of problems and issues which cut across national boundaries, and the interconnectedness of cultural, environmental, economic, political, and technological systems, and (2) the cultivation of cross-cultural understanding, which includes development of the skill of "perspective-taking"-that is, being able to see life someone else's point of view. Global perspective are important at every grade level, in every curricular subject area, and for all children and adults.

Definisi pendidikan global sebagaimana diketengahkan di atas, menekankan bahwa pendidikan

global mencakup kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu yang melintasi batas-batas nasional, saling keterhubungan budaya, lingkungan, ekonomi, politik, dan system teknologi. Dan pemahaman lintas-budaya yang di dalamnya termasuk pengembangan keterampilan "menentukan perspektif atau pandangan" sebagai sebuah sudut pandang seseorang. Perspektif global itu sangat penting untuk semua tingkatan usia, anak-anak maupun orang dewasa.

Sementara itu, Jiro Nagai, sebagaimana dikutip Nursid Sumaatmadja (1995:24) mengatakan, dalam kehidupan yang makin terbuka dewasa ini di abad XXI, kesadaran internasional, pemikiran mendalam tentang dunia termasuk pandangan dan wawasan global, telah menjadi bagian kehidupan tiap bangsa. Oleh karena itu, pendidikan internasional dan atau pendidikan global harus menjadi bagian pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Untuk memasuki ambang pintu abad XXI, IPS sudah tidak dapat mengabaikan pendidikan internasional atau pendidikan global tersebut. (*Today, international awareness, world mindedness, and global nespoints have come necessary for the livelihood of every nation. Therefore, international education must be given increased emphasis in sosial studies education. It may be said that social studies education for the twenty-first century should be international/global education*).

Selanjutnya Carlos Diaz, Massialas, dan Xanthopoulos (1999:209) memaknai pendidikan global sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep global dan

isu-isu dan mengarahkan pula kepada tindakan sebagai warga negara. (*global education is a pedagogy that aims at student learning of global concepts and issues and leads to citizen action*). Pengertian di atas lebih menekankan tujuan pendidikan global yakni untuk membelajarkan siswa tentang masalah-masalah global, isu-isu global, konsep-konsep global.

Berdasarkan pengertian pendidikan global menurut para ahli yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan global pada dasarnya merupakan pendidikan untuk membantu siswa memahami konsep dan isu-isu global, antara lain meliputi masalah politik, ekonomi, budaya, lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Dengan demikian, siswa akan mampu menentukan sudut pandangnya (*point of view*) sebagai sebuah perspektif global (*global perspective*) dalam kedudukannya sebagai warga negara yang cerdas dalam menanggapi serta mengkritisi masalah-masalah global tersebut.

Nu'man Somantri (2001:190) menegaskan pentingnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang berorientasi global, dengan menampilkan pendidikan global (*global education*). Lebih lanjut beliau mengatakan, "... dinamika masyarakat dan globalisasi sangat dirasakan terutama bahan ajar yang selama ini terlalu menitikberatkan kepada teori-teori dan *non-functional knowledge*. Isi bahan ajar seperti itu, praktis tidak dapat memperkaya atau menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan derasnya globalisasi dalam teori maupun gejala dan masalah-masalah kemasyarakatan yang

berhubungan satu sama lain."

Dengan demikian, kami memandang betapa pentingnya pendidikan global tersebut untuk menyiapkan warga negara global, yakni warga negara yang mengetahui, memahami, serta menanggapi secara kritis berbagai masalah atau isu global yang mengemuka dalam kehidupan saat ini. Perlu diingat, bahwa akibat globalisasi yang terjadi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan antarbangsa, dengan sendirinya menyebabkan timbulnya ketergantungan global antarbangsa yang antara lain direfleksikan dalam bentuk kerjasama antarbangsa. Di sinilah diperlukan warga negara yang memiliki wawasan global sebagai syarat pokok untuk melibatkan diri dalam berbagai bentuk partisipasi warga negara dalam kaitannya dengan meningkatnya hubungan atau interaksi antarbangsa di seluruh belahan dunia ini.

Mengingat argumentasi itu, tidaklah berlebihan kiranya muncul berbagai gagasan atau pemikiran untuk memperkuat ilmu pengetahuan sosial termasuk di dalamnya adalah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara dunia (*global citizen*) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam kaitan ini, patut disimak pendapat yang dikemukakan Robert Hanvey's (Diaz, Massialas, Xanthopoulos, 1992) bahwa dimensi-

dimensi dalam pendidikan global mencakup antara lain :

- Kesadaran perspektif, yakni kesadaran dan kemampuan mengapresiasi pikiran-pikiran orang lain di dunia ini, dan kesediaan menerima perbedaan pandangan yang terjadi.
- Kesadaran bangsa di planet jagat raya, yakni memahami secara mendalam tentang isu-isu global, peristiwa-peristiwa global, serta berbagai kondisi dalam kehidupan global.
- Kesadaran lintas-budaya: pemahaman umum tentang makna karakteristik budaya-budaya di dunia ini, memahami perbedaan serta persamaan antarkebudayaan tersebut.
- Pengetahuan tentang dinamika global : kesadaran global akan adanya sistem internasional yang kompleks yang dilakukan baik oleh negara maupun bukan negara yang dilakukan saling ketergantungan dan saling membutuhkan antarbangsa.
- Kesadaran terhadap pilihan manusia: meninjau tentang strategi untuk melakukan tindakan atas berbagai isu lokal, nasional, dan internasional.

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sebagai bidang kajian atau ilmu yang menekankan fokus studinya kepada warga negara dan perilakunya, sangat relevan dengan upaya-upaya untuk mempersiapkan warga negara global tersebut. Dalam kaitan ini, John Cogan merekomendasikan konsep

kewarganegaraan multidimensional (*multidimensional citizenship*) untuk memberikan teori dasar dalam membangun pendidikan kewarganegaraan pada abad XXI ini. Kewarganegaraan multidimensi itu meliputi dimensi pribadi, dimensi sosial, dimensi ruang, dimensi duniawi. Masing-masing dimensi tersebut akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:

Dimensi Pribadi

Dimensi pribadi kewarganegaraan meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berpikir, hati dan tindakan yang mencerminkan tanggungjawab secara sosial. Secara individu warga negara harus mempunyai komitmen dengan cara hidup di dunia dan mengatur kehidupannya.

Dimensi Sosial

Dimensi sosial kewarganegaraan berkenaan dengan aktivitas sosial. Sebagaimana dikemukakan Dewey dan Parker, kewarganegaraan adalah aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerja bersama dalam keadaan dan konteks yang beragam. Dalam kaitan ini warga negara harus melibatkan diri seperti dalam kegiatan diskusi dan perdebatan publik, memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan kekerasan, menghargai gagasan atau pikiran yang berbeda.

Keterlibatan sosial warga negara merupakan hal pokok dalam

membangun kewarganegaraan multidimensi tersebut. Apalagi dalam abad XXI warga negara akan dihadapkan pada masalah global yang sangat kompleks yang menuntut warga negara berpartisipasi dalam cakupan yang luas dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang kehidupan sosial.

Dimensi Ruang

Dalam dimensi ruang ini, warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota sejumlah masyarakat yang berlapis yakni lokal, nasional, regional, dan multinasional. Tantangan abad XXI melebihi batas-batas nasional, dan karenanya memerlukan penyelesaian multinasional. Era globalisasi dunia akan menjadi saling ketergantungan antarbangsa-negara di penjuru dunia ini.

Rasa identitas nasional yang berakar kepada budaya lokal dan nasional menjadi sangat penting dalam percaturan global dengan intensitas saling ketergantungan yang tinggi tersebut.

Dimensi Duniawi

Dalam kaitan ini kewarganegaraan berhubungan dengan tantangan kontemporer dimana warga negara tidak boleh hanya memperhatikan masa sekarang saja dan kurang atau tidak memperhatikan masa lampau dan lebih-lebih masa depan. Kewarganegaraan multidimensional mensyaratkan bahwa masa kini dan tantangannya diletakkan pada konteks masa lampau dan masa depan sehingga penyelesaian

masalah dengan cara-cara jalan pintas dapat dihindari seawal mungkin. Bagaimanapun masa depan harus diperhatikan. Sehingga setiap tindakan warga negara senantiasa berorientasi ke masa depan (*future oriented*). Tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap kewarganegaraan pada masa yang akan datang.

Dimensi-dimensi kewarganegaraan multidimensi sebagaimana dijelaskan di atas memiliki ketergantungan atau saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Walaupun dalam pembahasannya bersifat terpisah, namun dalam kenyataannya merupakan bagian yang utuh atau tak dapat dipisahkan antardimensi tersebut. Cogen menegaskan bahwa rasa identitas warga negara harus ditempatkan pada keragaman tingkatan, dari lokal, nasional, sampai kepada internasional.

Dalam analisis kami, dimensi-dimensi dalam kewarganegaraan multidimensional sebagaimana dikemukakan Cogen, sangat relevan dalam rangka memperkuat jati diri pendidikan kewarganegaraan yang dikontekstualisasikan dengan kecenderungan-kecenderungan global yang timbul dalam abad XXI yang penuh dengan berbagai perubahan besar dan mendasar menyangkut eksistensi bangsa-negara, peran warga negara, serta kompleksitas masalah yang timbul di dalamnya.

Pentingnya PKn untuk memasukkan kajian tentang pendidikan global dalam materi pembelajarannya dilatarbelakangi argumentasi karena

masalah-masalah global yang timbul dalam kehidupan global dewasa ini menuntut keterlibatan atau partisipasi warga negara di belahan dunia ini untuk bersama-sama memecahkannya secara kritis dan konstruktif.

Dengan merujuk kepada pandangan futurog Alvin Toffler, Nu'man Somantri (2001) menegaskan bahwa ledakan ilmu pengetahuan sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan tingkat nasional, regional, dan global masih akan terus berlangsung. Bahkan, hingga 100 tahun mendatang dunia akan tetap ditandai oleh maraknya kemiskinan dan kekerasan. Dunia barat menandai era ini dengan tampilnya isu-isu demokrasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas. Hal inilah yang menuntut pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk menata diri dengan perkembangan tersebut, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang dewasa ini dengan mudah dapat diketahui dan diakses melalui internet.

Pendapat di atas menekankan pentingnya pendidikan IPS terlebih pendidikan kewarganegaraan untuk mulai menata diri dengan berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi tidak saja dalam lingkup nasional dan regional, melainkan dalam lingkup internasional atau global.

Berikut ini dikemukakan beberapa masalah global yang perlu menjadi orientasi Pendidikan IPS dalam mengembangkan misi pendidikan kewarganegaraan global, antara lain :

Pertama, adanya pergeseran dari demokrasi perwakilan kepada demokrasi

partisipatori. Hal ini penting, mengingat rakyat di berbagai negara dewasa ini memiliki cukup keberanian untuk menyuarakan aspirasi atau tuntutan mereka untuk memperoleh hak-haknya. Rakyat sangat kritis terhadap tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan para pemimpinnya. Jika kebijakan tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat, maka reaksi rakyat muncul dengan sangat deras dan cepat. Kekuasaan yang otoriter dan represif yang dilakukan oleh penguasa mendorong rakyat melakukan berbagai aksi diantaranya melalui demonstrasi atau unjukrasa untuk menolak segala bentuk tindakan-tindakan otoriter dan represif tersebut. Jadi, peran kontrol sosial rakyat dewasa ini benar-benar sedang dilaksanakan oleh seluruh rakyat di berbagai belahan dunia untuk mengawasi atau mengawal pemerintahannya agar selalu memperhatikan dan berpihak kepada rakyat.

Kedua, orientasi kepada pemecahan konflik dengan tidak menggunakan kekerasan (*non violent manner*), mengingat dewasa ini intensitas konflik baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional terjadi dengan sangat cepat. Dalam konteks ini, sangat diperlukan kemampuan warga negara untuk memecahkan masalah atau konflik yang terjadi dengan menggunakan cara-cara damai (*peacefulness*).

Ketiga, orientasi kepada isu-isu global yang saat ini terjadi dalam berbagai belahan dunia. Hal ini penting, mengingat munculnya isu-isu global yang perlu disikapi secara kritis dan proporsional. Warga negara harus

memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu global tersebut sebagai bagian penting dari upaya pembentukan warga negara global yang cerdas dan kritis.

Keempat, orientasi kepada penguatan masyarakat sipil (*civil society*), mengingat dewasa ini peran serta atau partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan serta jaminan keterbukaan dan keadilan, serta kebebasan untuk menegakkan masyarakat sipil (*civil society*).

Hasil Seminar dalam rangka ulang tahun Kompas ke 25, yang bertema “Menuju Masyarakat Baru Indonesia : Antisipasi terhadap Tantangan Abad XXI”, menghasilkan berupa gagasan tentang sosok manusia yang siap dan mampu menghadapi tantangan abad 21. Adapun ciri-ciri yang menandai manusia Indonesia yang siap dan mampu menghadapi tantangan abad 21, yaitu (1) sadar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), (2) kreatif, dan (3) memiliki solidaritas etnis. (St.Sularto, 1990).

Ciri pertama, yakni manusia yang sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) antara lain memiliki indikator : (a) *well informed* yakni serba tahu, menghargai pentingnya informasi, mampu memahami atau mencerna derasnya arus informasi, membuat analisis tajam atas masalah yang dihadapinya. (b) mampu menalar secara rasional (*rational reasoning*) sehingga reaksi yang diberikannya lebih didasari kepada pertimbangan rasional daripada hal-hal yang bersifat irrasional, di samping itu mampu berpikir secara kreatif-integratif, dan konseptual.

Ciri kedua, manusia kreatif antara lain memiliki indikator : (a) bebas, dalam arti tidak tergantung kepada orang lain, (b) bekerja ulet, untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan-harapannya; (c) berinisiatif dalam arti mampu berpikir dan bertindak secara orisinal; (d) pengendalian diri dari dalam (*internal locus of control*), dalam arti kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; (e) kemantapan diri (*self-esteem, self-confidence*) yang mencakup percaya pada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri.

Ciri ketiga, manusia yang memiliki kesadaran etnis, dengan indikator diantaranya adalah (a) peka terhadap keadilan dan solidaritas; (b) mempunyai pedoman moral-etis yang melandasi setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu, menurut pendapat Dorothy Rich yang dikutip Muhammad Surya (1995) mengintrodukir atau memperkenalkan konsep “*mega-skills*” atau keterampilan-keterampilan mega yang harus dimiliki dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan global. Keterampilan-keterampilan yang dimaksud, meliputi : (a) motivasi diri; (b) motivasi; (c) tanggungjawab; (d) daya juang; (e) inisiatif; (f) keras hati dalam arti tekun; (g) kepedulian; (h) kerja tim; (i) pikiran sehat; dan (j) pemecahan masalah.

Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dikemukakan di atas,

sudah barang tentu harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh warga negara baik dalam level lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sosok PKn yang mengemban misi pendidikan global (*global education*) dalam pelaksanaannya tentu tidaklah berjalan mudah, mengingat berbagai faktor yang turut mempengaruhi seperti guru, siswa, media pembelajaran, materi pembelajaran, ketersediaan prasarana dan sarana, suasana lingkungan, kondisi sosial politik masyarakat, dan sebagainya. Untuk kepentingan analisis,

faktor-faktor sebagaimana disebutkan itu dapat dipisah-pisahkan. Namun, untuk dalam kenyataannya hubungan antar faktor tersebut sangat erat, sehingga tidak mungkin memisahkan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. Dengan demikian, kajian yang komprehensif menyangkut faktor-faktor di atas sangat perlu, untuk memperkuat PKn yang lebih berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Dahlan. M. 1996. *Globalisasi Wawasan, Komunikasi, dan Informasi : Tantangan Akademisi Masa Depan*. Jakarta : BP-7 Pusat
- Borba, Michele. 2001. *Building Moral Intelligence*. San Fransisco : Jossey Bass
- Diaz, Carlos & Massialas, Xanthopaulus. 1999. *Global Perspective for Educator*. Boston : Allyn and Bacon
- Dedy Djamaludin Malik. 1993. *Komunikasi dan Budaya Massa*. Audientia Jurnal Komunikasi. LP3 K Bandung dan Humas Pemda Jabar
- Hahn, Carole L. 1998. *Becoming Political. Comparative Perspectives on Citizenship Education*. New York : SUNY Press
- Frederickson, Ronald H, & Rothney, John W.M. 1972. *Recognizing and Assisting Multipotential Youth*. Ohio : Merryl Publishing Company
- Gunsteren, Herman Van. 1998. *A Theory of Citizenship : Organizing Plurality in Contemporary Democracies*. USA : Westview Press
- Heru Nugroho. 2001. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Korten, David. 1993. *Getting to the Twenty First Century : Voluntary Action and The Global Agenda*. Alih bahasa : Lilian Tejasudhana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Sinar Harapan
- Print, Murray. 1999. *Civic Education for Civil Society*. London : ASEAN Academic Press
- Rapaar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta : Radja Grafindo Persada
- Sapriya & Udin S. Winataputra. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung : Laboratorium PKN FPIPS UPI
- Shane, Harold G. 1984. *The Educational Significance of the Future*. Alih bahasa oleh M. Ansyar. Yusuf Hadi Miarso (ed). Jakarta : Rajawali Press
- Somantri, Nu'man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda Karya dan PPS UPI
- Sumaatmadja, Nursid. 1998. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*. Bandung : Alfabeta
- Turner, Long, Bowes & Lott. 1990. *Civics : Citizens in Avtion*. Columbus, Ohio : Merryl Publishing Company
- Tye, Barbara Benham & Kennet Tye. 1992. *Global Education : A Study of Social Change*. New York : SUNY Press

**MODEL INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI
FILSAFAT DASAR (*PHILOSOPHISCHE GRONSLAG*)
DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**

Sri Wahyuni Tanshzil
Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS UPI, Bandung
sriwahyunitanshzil@upi.edu

Abstrak

Nilai-nilai Pancasila merupakan satu bentuk titik temu pemikiran dan harapan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini, menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjadi pegangan dalam bertindak agar membentuk pribadi warganegara yang memiliki serta mencerminkan jatidiri dan karakter bangsa. Urgensi internasilasis nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter dapat ditinjau dari tiga landasan dasar, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan pendidikan. Model implementasi yang digunakanpun variatif, dimulai dari pendekatan yang bersifat hard approach (yang dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan melalui badan resmi negara), hingga pendekatan soft approach, yang dilaksanakan secara lebih dinamis pada beberapa sektor, yaitu pendidikan, sosial-kemasyarakatan dan pemanfaatan IPTEK.

Key Word: Model, Internalisasi, Nilai-nilai Pancasila, Filsafat Dasar, Karakter Bangsa

Pendahuluan

Pancasila merupakan titik temu pemikiran, harapan dan pandangan bangsa Indonesia. Terdapat tujuan bersama yang harus diperjuangkan hingga tercapai tujuan Indonesia Merdeka. Yaitu Indonesia yang mampu berdiri diatas kekuatan sendiri dengan karakter unggul yang dimiliki, sehingga mampu bersaing baik pada level lokal, nasional maupun Internasional. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (LPPKB,2011:4).

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian (2006: 107), Pancasila tidak lebih dari satu kontrak sosial. Hal ini dibuktikan dengan begitu hebatnya perdebatan dan persetujuan diantara anggota BPUPKI dan PPKI dalam menyepakati dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Seperti dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa:

Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu "Weltanschauung" yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Ki Bagus Setujui, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanoesi setuju, yang sdr. Abikoeso setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pada waktu itu, pancasila menjadi satu kontrak sosial bangsa Indonesia. Sebuah kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama antara seluruh perwakilan warga negara, baik dari wilayah Indonesia bagian Barat hingga mampu mengakomodir permintaan serta keberatan dari wilayah bagian Timur. Hal ini menjadi cerminan bahwa Pancasila menjadi sebuah kesepakatan bersama yang berisi prinsip-prinsip dasar sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Status pancasila dari waktu ke waktu tidak berada pada kondisi yang sama, seperti pada Tahun 1950, banyak tokoh yang ingin melakukan reinterpretasi Pancasila bagi negara Indonesia. terdapat dua golongan yang mampu mewakili secara general pandangan para tokoh (Ali As'ad, 2009:29), yaitu golongan yang *pertama*, beberapa tokoh yang menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Tidak hanya memandang sebagai kompromi politik, juga sebagai sebuah filsafat sosial atau *Weltashauung* bangsa. Konsep ini sama seperti apa yang dikemukakan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dimana Pancasila merupakan jatidiri bangsa yang didapat dari intisari kebudayaan tertinggi dan asli bangsa Indonesia, sehingga akan senantiasa sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan Zaman yang ada. Golongan *kedua* berpendapat bahwa, Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Yaitu kompromi

dari golongan Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam tentang dasar negara. Pancasila menjadi penawar atas segala krisis yang melanda bangsa Indonesia, sehingga semua golongan sepakan menempatkan Pancasila sebagai landasan Dasar Negara Indonesia. Dari kedua golongan tersebut, dapat diketahui bahwa Pancasila menjadi satu bentuk kompromi sosial bangsa Indonesia, Pandangan hidup serta landasan dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila menjadi pedoman bertingkah laku warga negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Posisi Pancasila saat ini, bukan tanpa masalah, konotasi negatif sering muncul dalam memandang Pancasila. Hal ini terjadi dikarenakan sebuah keniscayaan bahwa kondisi Pancasila dalam pandangan warga negara tidak selamanya berada dalam kondisi yang maksimum. Banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya ialah pergantian kekuasaan negara. Hasil survey harian Kompas 2008, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila semakin merosot; 48, 4% responden tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap; 42, 7% salah dalam menyebutkan sila-sila Pancasila; dan 60,6 % salah dalam menyebutkan kelima sila Pancasila.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila pada tataran pemahaman kognitif pun masih menghadapi kendala, sehingga pertanyaan berikutnya menjadi menarik,

bagaimana kemungkinan Pancasila mampu difahami, dihayati serta diimplementasikan dengan baik? Sebagai contoh akan jawaban tersebut, dapat kita lihat saat ini, banyak perilaku warga negara yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Tingkat Korupsi pejabat Indonesia yang masih tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK pada bulan Agustus 2016 yang menyatakan bahwa terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi di Indonesia; 2) Meningkatnya tindak kriminalitas; 3) menurunnya etos kerja, dan sebagainya (Megawangi, 2004:14). Dalam kajiannya, arif (Terjadinya pergeseran karakter warga negara pada saat ini menjadi alasan penulis untuk membahas tentang bagaimana model internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Falasafah Dasar (*Philosophische Groslog*) dalam membangun Karakter Warga Negara.

Pembahasan

Landasan Dasar Urgensi Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Karakter Bangsa

Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989;336) dimaknai sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Scott (1971, hlm. 12) dilain pihak menyatakan pendapatnya tentang internalisasi

sebagai “sesuatu hal yang melibatkan ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam mindah (pikiran) dari suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi”. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa internalisasi merupakan sebuah proses belajar seseorang warganegara terhadap suatu konsep nilai atau norma yang ada dalam lingkungan masyarakat melalui pembinaan atau bimbingan yang pada akhirnya dapat membentuk pribadi seseorang.

Internalisasi nilai-nilai tersebut dilaksanakan berdasarkan pada tatanan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi kesepakatan sosial antara seluruh warganegara Indonesia menjadi pedoman dalam pengembangan karakter Warganegara. Terdapat beberapa landasan dasar Urgensitas Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter Bangsa, yaitu: *Pertama* landasan Filosofis, landasan ini disandarkan pada hakekat utama lahirnya Pancasila. Dimana Pancasila digunakan sebagai kesepakatan bersama, sebagai kontrak sosial juga sebagai filsafat Dasar (*Philosophische Grondslag*) Bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Yudi Latif (2012;2) mengutarakan bahwa, Keberadaan Pancasila itu bukanlah pilihan oportunistis yang timbul dari lemahnya kepercayaan diri, melainkan pancaran dari karakter ke-Indonesiaan. Mengacu pada paradigma Pancasila tersebut maka

terdapat relevansi tekstual maupun kontekstual sebagai dasar negara yang mengandung tata nilai pembangunan di sektor pendidikan yang berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan, pendoman dan pegangan yang harus diketahui, dimaknai, hingga mampu diaplikasikan dalam kepribadian warganya. Oleh karena itu, satu hal yang pasti dimana nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan dalam rangka pengembangan karakter atau watak bangsa Indonesia.

Kedua landasan Sosiologis. Landasan ini disandarkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana arus global yang kian hebat ditambah dengan perkembangan IPTEK yang kian tak terbendung, memberi dampak yang tidak hanya positif tapi juga negatif terhadap perkembangan karakter warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Prosiding UAD; 2014) yang mengidentifikasi empat permasalahan utama kebangsaan saat ini, yaitu: 1) memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan yang ditandai oleh menguatnya primordialisme (etnis/ kedaerahan, kelompok, dan keagamaan); 2) Kehidupan beragama masih dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik, dan sekuler yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama; 3) Memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang ditandai oleh munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks dalam kehidupan

masyarakat, berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas yang cenderung meningkat, pranata sosial yang luhur seperti gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial, dan masih kuatnya budaya patriarki yang membawa implikasi pada pandangan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan; 4) Dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang mencerminkan mental bangsa yang lembek (*soft nation*) yang ditandai oleh kecenderungansikapinlander, inferior, suka menerabas, perilaku instant, tidak disiplin, suka meremehkan masalah, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab, mudah mengingkari janji, dan toleran terhadap penyimpangan. Berdasarkan kondisi bangsa tersebut, menjadi sebuah keharusan bagi semua elemen, baik masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bersama dalam membenahi kondisi moral anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang secara nyata dimuat dalam Pancasila.

Ketiga Landasan Pendidikan, Landasan ini disandarkan kepada tujuan utama pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Perundang – Undangan. Salah satu diantaranya adalah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu:

a. Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

b. pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama pengembangan pendidikan Indonesia adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang berarti membentuk karakter yang tangguh serta utus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain tertera dalam UUD RI 1945, tujuan pendidikan Indonesia secara spesifik berada dalam Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada *Pasal 3 Undang- Undang tersebut menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”* Dari tujuan tersebut dapat terlihat core atau inti dari pengembangan Pendidikan Indonesia adalah pembentukan Watak

serta Karakter dalam rangka membangun peradaban bangsa.

Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Filsafat Dasar (Philosophische Gronslag) dalam Membangun Karakter Bangsa

Pengembangan karakter Bangsa Indonesia seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tidak hanya menyentuk domain *moral knowing*, tapi juga harus mampu hingga pada

moral feeling serta *moral behavior*. Tidak hanya mampu mencerdaskan bangsa tapi juga mampu membentuk karakter serta watak warga negara sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tahun 2010 merinci nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sebagai capaian pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. Berikut ini tabel Nilai Dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa:

2.1 Tabel Nilai Dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa

NILAI	DESKRIPSI NILAI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya
Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki
Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa
Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain
Bersahabat	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain
Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional RI

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menentukan standar pengembangan nilai karkater bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai serta jati diri Bangas Indonesia.

Internalisasi nilai-nilai karakter tersebut merupakan upaya menghayati dan mendalami nilai, agar tertanam dalam diri setiap manusia. Pertumbuhan ini terjadi

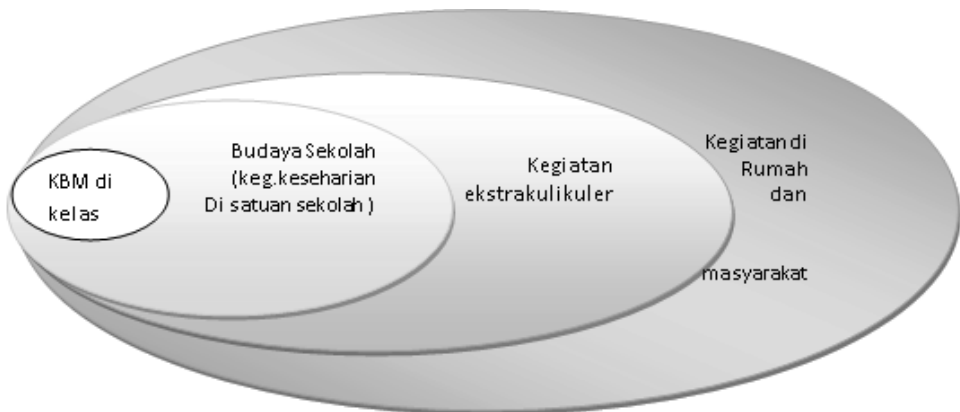
ketika mereka menyadari sesuatu nilai yang terkandung didalamnya, kemudian dijadikan suatu sistem nilai diri sehingga membentuk karakter para santri yang menuntun segenap pernyataan sikap, perilaku dan perbuatan moralnya dalam menjalani kehidupan. Tahap-tahap internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter mencakup a) Transformasi nilai, pada tahap ini Stakeholder menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang salah kepada warganegara,

b) transaksi nilai yaitu suatu tahap pendidikan karakter dengan jalan melakukan komunikasi dua arah. Dan c) transinternalisasi, dimana pada tahap ini penampilan para stakeholder di hadapan para warganegara bukan hanya sosok fisiknya saja, tetapi sikap mental dan kepribadiannya (Mulyasana, 2011: 166).

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter warganegara. Yaitu pendekatan secara *Hard Approach* dan Pendekatan *Soft Approach*. Pendekatan *hard Approach* ini dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga resmi negara Indonesia. Amanah pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam UUD RI Tahun 1945 dan dalam UU No. 20 tahun 2003. Sehingga pada tataran formal

internalisasi dan pengembangan nilai-nilai karakter menjadi satu kewajiban, dan apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksi terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Pendekatan secara *soft Approach* dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang lebih dinamis, baik dalam bidang pendidikan, sosial-kemasyarakatan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK. Dalam *lingkungan satuan pendidikan*, internalisasi nilai-nilai karakter bangsa dilaksanakan melalui empat pilar utama, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan, kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan dalam masyarakat (Budimansyah, 2010:57). Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Konteks Mikro Pengembangan Karakter
 Sumber: Grand Desain Pendidikan Karakter (2010)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pengembangan pendidikan karakter pada lingkungan formal menjadi fungsi dari seluruh potensi individu manusia baik kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik dalam konteks interaksi sosiokultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural tersebut dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Dalam lingkungan sosial-masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang dapat mendukung pada pencapaian internalisasi nilai-nilai karakter warganegara, yaitu melalui komitmen dari semua unsur masyarakat untuk menanamkan sebuah koordinasi gerakan revitalisasi kebangsaan bersama generasi muda serta beberapa kalangan masyarakat terkait. Generasi muda menjadi tumpuan bangsa oleh karena itu kegiatan pengembangan karakter diarahkan terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa terhadap upaya nihilisasi pihak luar terhadap nilai-nilai budaya positif bangsa Indonesia (Muslich, Masnur; 2011). Selain itu, adanya perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang sifatnya nonformal, seperti pengajian, perkumpulan organisasi tertentu, dapat digunakan

sebagai salah satu media internalisasi nilai-nilai karakter bangsa.

Adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini, menjadi salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat terjadinya proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter warganegara. Hal ini dapat dilakukan dengan komitmen yang tegas antara pihak pemerintah dan swasta dalam memetakan program-program tayang yang layak serta mendukung pada penguatan karakter serta jatidiri warga negara. Selain itu, dengan adanya kemajuan di bidang IPTEK, Internalisasi nilai Pancasila dapat dibuat seefektif mungkin, misal melalui program-program iklan dengan konten penguatan karakter dan jati diri bangsa yang dikemas dalam bentuk aplikasi-aplikasi di media internet atau Hand Phond. Selain itu, tersedianya berbagai referensi buku yang bemuatan serta menunjang pendidikan karakter dalam bentuk e-book. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui, memahami serta akhirnya mampu menginternalisasi nilai-nilai inti yang siratkan.

Penutup

a. Kesimpulan

Internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah proses belajar seseorang warganegara terhadap suatu konsep, ide, atau norma yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila melalui pembinaan atau bimbingan yang pada akhirnya dapat membentuk

pribadi seseorang. Terdapat beberapa dasar urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan Landasan Pendidikan. Implementasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu hard Approach dan soft Approach. Pendekatan hard Approach dilaksanakan melalui pembentukan peraturan perundangan yang mendukung pada penguatan karakter bangsa, sedangkan pendekatan soft approach dilakukan melalui pendekatan yang lebih dinamis melalui beberapa bidang strategis, yaitu diantaranya pengembangan

dalam bidang pendidikan, sosial-kemasyarakatan serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Rekomendasi

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan karakter bangsa hendaknya dimaknai secara menyeluruh, tidak membebankan pada satu pihak tertentu, tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Melalui pendekatan yang dilaksanakan pada semua sektor kehidupan, baik pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga internalisasi nilai-nilai tersebut mampu dilaksanakan secara komprehensif dan efektif karena didukung oleh semua kalangan.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Harian Terbit. 2016. 316 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi. Diunggah dari <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/08/05/66825/25/25/361-Kepala-Daerah-Terjerat-Kasus-Korupsi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1987
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2011. *PANCASILA*. Jakarta: LPPKB.
- Onghokham dan Andi Achdian. 2006. *Pancasila: Dari Kontrak sosial menjadi Ideologi Negara dalam Irfan Nasution dan Ronny Agsutinus, Restorasi Pancasila: mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* (Depok, FISIP UI).
- Latif, Yudi. 2012. *Pancasila Sebagai Titian Pendidikan Karakter*. Makalah disampaikan dalam Konggres Pancasila di Gedung Nusantara V MPR RI tanggal 30-31 Mei 2012.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter "Menjawab Tantangan krisis Multidimensional"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arief, Dikdik Baehaqi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pembentukan Karakter Demokratis Warga Negara*. Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional "Optimalisasi peran Pendidikan dalam membangun pendidikan Anak Untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia" tanggal 14 Desember 2014
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

**STRATEGI MEMPERKUAT PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
DAN DASAR NEGARA DI ERA DIGITAL
(BAHAYA RADIKALISME FILSAFAT DAN IDEOLOGI)**

Runik Machfiroh

Mahasiswa S3 PKn SPs UPI

Dosen dan Peneliti Telkom University

runik87@gmail.com; runikmachfiroh@student.upi.edu; runikmachfiroh@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Era digital telah membuat arus informasi begitu cepat dengan konten yang sulit dapat dibendung, khususnya radikalisme filsafat ideologi berupa gerakan anarkis dan gerakan komunis Marxisme-Lenin yang tanpa kasat mata dapat mempengaruhi pemikiran, opini dan perilaku warga negara. Dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi di era digital maka, diperlukan pendekatan PKn melalui model fusi dengan berpegang pada 9 keterampilan warga negara dengan Pancasila sebagai kaidah fundamental bangsa sebagai dasarnya.

Kata Kunci: Digital, Penguatan Pancasila, Ideologi, Radikalisme, PKn, Model Fusi

Latar Belakang Masalah

Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Pada era digital saat ini tidak lepas pula dari tantangan aktualisasi atau penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Perkembangan teknologi yang semakin cepat sebagai tanda modernitas. Teknologi telah menjadi kebutuhan setiap sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi telah membuat produk baru berupa elektronik massal yang memperpendek jarak, ruang, dan waktu khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor tantangan bagi masuknya berbagai informasi yang masuk kepada setiap warga negara khususnya melalui media sosial.

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di dunia yaitu sebesar 35% dari penduduk Indonesia sekitar 2.307 juta orang per Januari 2016 pengguna media sosial aktif (www.appjii.com). Hal ini menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri bagi negara Indonesia khususnya dalam penguatan dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Informasi dalam berbagai bentuk, sumber dan keabsahan data informasi yang didapat susah diketahui kebenarannya. Tantangan terbesar bangsa dan negara Indonesia

saat ini dalam penguatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah radikalisme filsafat dan ideologi yang disebarakan melalui media sosial ataupun internet. Adapun radikalisme filsafat dan ideologi itu berupa gerakan radikalisme anarkisme dan gerakan radikal komunisme/ Marxisme-Leninisme (Bahar, S: 2016). Belum banyak diperhatikan secara serius terkait radikalisme filsafat dan ideologi, padahal menurut hemat penulis radikalisme filsafat dan ideologi yang sudah tersebar di dunia maya itu harus segera dicegah. Masa orde lama radikalisme filsafat dan ideologi pernah terjadi di Indonesia sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, namun Pancasila masih tetap teguh sebagai dasar dan ideologi negara sehingga muncul hari kesaktian Pancasila. Oleh karena itu, perbedaan jaman berbeda pula strategi masuknya radikalisme filsafat dan ideologi. Bagaimana strategi penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara di era digital dalam menanggulangi radikalisme filsafat dan ideologi?

Pembahasan

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan bangsa, suatu perjanjian luhur, memiliki legalitas, kebenaran, dan *living reality* dikarenakan Pancasila lahir dari nilai-nilai yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman, panduan dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi secara etimologi adalah kumpulan ide-ide dan gagasan-gagasan yang dijadikan sebagai keyakinan dalam mencapai cita-cita, ideologi adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mendalam yang bersumber dari budaya masyarakat dengan sifat dinamis disesuaikan dengan tantangan jaman dengan tidak mengingkari jatid dirinya serta optimisme dari masyarakatnya untuk tetap dipertahankan.

Pancasila berisi konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh dan mendasar mengenai eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan LPPKB 2017 Pancasila harus berisi konsep dasar yaitu:

- a. *Religiositas*, suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak, apapun namanya. Sebagai akibat terjadilah pandangan tentang eksistensi diri manusia, serta sikap dan perilaku devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa.
- b. *Humanitas*, suatu konsep yang mendudukan manusia dalam tatahubungan dengan manusia yang lain. Manusia didudukan dalam saling ketergantungan sesuai dengan harkat dan

martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Benar.

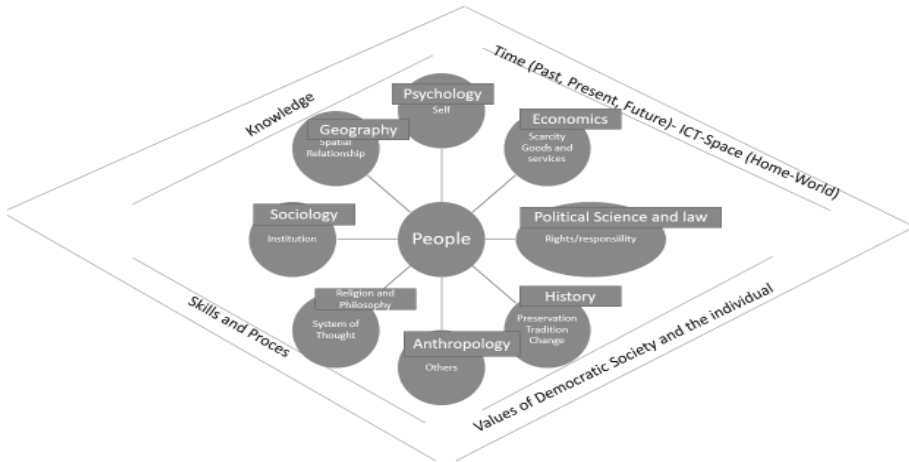
- c. *Nasionalitas*, suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia yang bertempat tinggal di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut bangsa. Sikap loyalitas warganegara terhadap negara-bangsanya merupakan suatu bentuk tata hubungan antara warganegara dengan bangsanya.
- d. *Sovereinitas*, suatu konsep yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat, suatu konsep demokrasi, dengan ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. *Sosialitas*, suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan perorangan.

Konsep tersebut jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu universal serta nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan sistemik, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau orisinal dan otentik, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi. Namun, radikalisme filsafat dan ideologi yaitu gerakan radikalisme anarkisme dan gerakan radikal

komunisme/Marxisme-Leninisme dalam era digital menjadi tantangan tersendiri. Dengan banyaknya fasilitas internet dan fungsi perannya dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Adapun pengaruh negatif diakibatkan terbukanya akses negatif bagi anak atau remaja dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet (Setiawan, 2009:28). Informasi yang negatif yang cukup berbahaya bagi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara adalah informasi dan propaganda radikalisme filsafat dan ideologi.

Sejumlah pakar telekomunikasi Amerika Serikat menyatakan bahwa fenomena bom informasi dalam dua dekade terakhir, pada awalnya membuat sensasi kejutan (*shock*), kemudian menjadi kebutuhan (*needs*), dan akhirnya tiba pada tahap akhir yakni menjadi penyangga kehidupan umat manusia se-elementer unsur-unsur lainnya seperti, agama dan pekerjaan (Dirgahayu, 2007:27). Artinya, sangat memungkinkan gerakan radikalisme anarkis dan radikalisme komunisme muncul melalui internet sebagai media strategis dalam penyebarannya. Mengingat, situs *networking* seperti Facebook, Friendster, BBM, Whats Application, Line, Twitter memungkinkan seseorang untuk menemukan teman ataupun informasi dengan berbagai negara. perkembangan teknologi informasi sangat cepat sehingga dapat merubah opini, perilaku dan kepribadian seorang warga negara (Gani, 2010:24).

Besarnya pengaruh dari perkembangan teknologi juga diungkapkan Barbara Walts yang mengungkapkan tentang ciri-ciri revolusi dunia, salah satunya adalah pengaruh ICT yang telah mempengaruhi tingkah laku dan pikiran manusia. Hal ini harus diwaspadai oleh negara, pemangku kebijakan dan salah satunya ahli PKn, artinya bagaimana PKn di masa mendatang. Hal ini tidak terlepas pada ideologi Pancasila sebagai dasar dalam pengembang ide. Dimana adanya perkembangan ICT menurut Cogan (1999) sebagai salah satu ciri globalisasi yang mana dapat merubah atribut atau karakteristik warga negara, karena perkembangan ICT ini tidak membatasi ruang, jarak dan waktu atau istilah Mc Luchan sebagai *global village*. Tentunya, ideologi Pancasila harus menjadi pedoman utamanya. Era digital saat ini, sangat mudah mempengaruhi generasi muda khususnya terkait gerakan radikalisme filsafat ideologi. Hal ini tercermin dari semakin sensitifnya masyarakat khususnya dalam media sosial dalam menanggapi, isu-isu ekonomi, sosial dan politik serta gerakan radikalisme filsafat ideologi yang dikhawatirkan memberikan terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa sehingga mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi atau landasan kaidah fundamental bangsa melalui perspektif PKn dalam model fusi. Adapun analisa dan simpulan dapat terlihat pada model fusi di bawah ini berdasarkan analisa penulis:



Gambar 1: Model Fusi Rekayasa Penulis

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwasanya kultur akademik PKn sebagai *knowledge humatities*. Adapun **substansi kultur akademis paedagogis PKn** adalah intergrasi ilmu pengetahuan dan *educational*. Dimana kultur akademis science PKn adalah filsafat pendidikan dan sejarah. Dimana PKn sebagai disiplin ilmu yang transdisipliner/cross disipliner dengan *Leading political science*, kaidah fundamental bangsa dan hukum. Secara filsafat keilmuan PKn berasal dari ilmu politik khususnya dari konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and rights of citizen*". Hal ini sesuai dengan pendapat Somantri, NM (2016) bahwasanya konsep awal PKn permulaanya adalah demokrasi politik, dimana pengembangan PKn melalui demokrasi politik khususnya dalam perilaku manusia, dimana

pengembangan PKn dari demokrasi politik mengalami sejarah yang cukup panjang. Adapun sejarahnya itu dimulai pada tahun 20-an yang disebut sebagai politic science, kajian institusi berubah ke political behaviorism yang lebih cenderung liberal. Dalam ilmu sosial asal muasalanya ada 5-9 cabang ilmu, untuk saat ini sudah ada 15 cabang ilmu. Berdasarkan model fusi di atas adapun posisi PKn adalah gabungan ilmu politik dan pendidikan. Struktur ilmu politik dirangkai sedemikian rupa untuk suatu keilmuan secara horisontal untuk tujuan pendidikan yaitu PKn. Dimana PKn penuh dengan value ideologi sebagai syarat objektif. Hal ini bertujuan untuk membentuk warga negaranya agar lebih memahami demokrasi Pancasila (Pancasila lebih bermakna).

Dalam menyimpulkan/*accumulated* dan memilih kajian dalam *knowledge system* PKn berdasarkan model fusi di atas, harus dilihat berdasarkan time (past, present dan future) dan tempat agar didapatkan sistesa yang seimbang, objektif, universal dan akurat. Penulis disini menambahkan perlunya ICT dalam model ini, menggingat ICT ini sebagai tools dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ICT yang saat ini dinamakan era digital telah membawa perubahan opini, sikap dan perilaku warga negara Indonesia pada khususnya. Suatu komunikasi yang dilakukan melalui internet telah mempengaruhi pada opini, sikap bahkan perilaku manusia khususnya kekhawatiran terhadap gerakan radikalisme komunis dan anarkis. Artinya, ICT sebagai tools yang dapat memperpendek jarak ruang dan waktu serta sebagai alat transfer knowledge dari semua ilmu. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki skill dalam penggunaan ICT yang berkelanjutan sesuai pendapat Van Der Jik (2014) dan Ribble Mike Ribble M dan Bailey Gerald (2007) bahwasanya Setiap warga negara di era digital harus memiliki digital skill mulai dari mengetahui penggunaan ICT sampai mampu memberikan kontribusi melalui internet serta dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi, yang didalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya bagi siswa dapat dilakukan melalui 9 elemen yang harus dikembangkan. Semua kemampuan yang harus dimiliki warga

negara harus didasarkan pada ideologi bangsa. ICT dapat digunakan sebagai alat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila serta Pancasila menjadi filter untuk nilai yang tidak sesuai budaya Indonesia yang masuk, menggingat era digital sebagai global village. Artinya, PKn memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda dalam era digital yang partisipatif bertanggung jawab sesuai kaidah fundamental bangsa serta mampu bersaing pada saat ini dan masa depan.

Adapun hal-hal yang harus generasi muda di era digital dalam penguatan Pancasila, berdasarkan Ribble M dan Bailey Gerald (2007) bahwasanya dipersekolah dalam meningkatkan kemampuan mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi, yang didalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya bagi siswa dapat dilakukan melalui 9 elemen yang harus dikembangkan.

Adapun 9 elemen tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. *Digital access*, yaitu siswa menggunakan internet
2. *Digital commerce* yaitu pengetahuan bahwasanya dalam memanfaatkan media digital untuk belanja online ataupun untuk jualan online harus memahami konsekuensinya terkait pengamanan data diri ataupun penipuan.
3. *Digital Communication* yaitu mengajarkan bagaimana berkomunikasi dalam masyarakat digital
4. *Digital Literacy* yaitu memberikan

- pengetahuan kapan dan bagaimana menggunakan teknologi. Oleh karena itu, guru juga dalam pembelajarannya melibatkan teknologi didalamnya.
5. *Digital Etiquete* bahwasanya sebagai pendidik khususnya guru PKn dimana tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik dan cerdas, maka guru harus mendidik terkait etika didalam menggunakan media digital kapan perlu menggunakan media digital.
 6. *Digital Law*; pengetahuan tentang Hak-hak hukum dan pembatasan yang mengatur penggunaan teknologi seperti apakah melanggar hak orang lain, bagaimana media ditital sebagai sumber informasi tetapi tidak plagiarisme.
 7. *Digital Rights and Responsibilities* bahwasanya media digital sebagai bentuk penegakkan hak kebebasan penyampaian pendapat dengan penuh tanggung jawab. Perlu pemahaman yang jelas tentang perilaku-perilaku didalam media digital seperti bagaimana cara mengutip dari internet dan sebagainya.
 8. *Digital Health and Wellness* bahwasanya unsur fisik dan psikologis sangat berkaitan dalam penciptaan kesejahteraan dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini pemberian pemahaman efek terhadap kesehatan dalam penggunaan teknologi.
 9. *Digital Security* bahwasanya Tindakan pencegahan bahwa semua pengguna teknologi harus ambil untuk menjamin keselamatan pribadi dan keamanan jaringan. Yaitu dengan
 - a. Melindungi hardware dan jaringan keamanan
 - b. Melindungi keamanan pribadi, pencurian identitas, phishing, menguntit online.
 - c. Melindungi keamanan sekolah: hacker, virus
 - d. Melindungi keamanan masyarakat: ancaman teroris
- Digital security*, yakni tindakan pencegahan bahwa semua pengguna teknologi harus ambil untuk menjamin keselamatan pribadi dan keamanan jaringan. Keamanan digital menjadi salah satu bagian yang harus dimiliki oleh Indonesia dan diketahui oleh setiap warga negara Indonesia. Posisi Indonesia saat ini berdasarkan data dari Kementrian Pertahanan Indonesia, radar yang dimiliki Indonesia hanya 24 radar dengan luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan/ archipelago, secara teori minimal yang harus dimiliki Indonesia adalah 52 radar. Posisi 24 radar Indonesia-pun belum selalu stand by aktif, namun bergantian aktif-nya. Hal ini, dalam menghadapi tantangan manusia abad 21 harus diperhatikan oleh setiap warga negara Indonesia karena ini dapat menjadi salah satu tantangan keutuhan NKRI khususnya radikalisme filsafat ideologi yang kasat mata.

Kesimpulan

Penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi di era digital maka, diperlukan pendekatan PKn melalui model fusi dengan

pengembangan 9 keterampilan warga negara digital serta kerjasama semua pihak dalam membumikan Pancasila sesuai dimensi fleksibilitas.

Daftar Pustaka

- Bennett, WL, et all. (2009). *Communicating Citizenship Online: Models of Civic Learning in the Youth Web Sphere*. A Report from the Civic Learning Online Project. USA: Center for Communication & Civic Engagement University of Washington
- Bahar, S: 2016. <https://www.slideshare.net/saafroedinbahar1/strategi-memperkuat-ideologi-pancasila>. Diakses pada tanggal 4 Sepetember 2017
- Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for The 21 Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page
- Dirgahayu. (2007). Citizen Journalism sebagai Ruang Publik, Jurnal ObservasiKajian Komunikasi Informatika. 5 (1).11-31
- Gani. (2010). *Menghadapi Media di Era Informasi*. Pikiran Rakyat (4 Maret 2010) LPPKB. (2017). [ttps://lppkb.wordpress.com/](https://lppkb.wordpress.com/) diakses pada tanggal 4 September 2017
- www.appjii.com. Pengguna internet Indonesia tahun 2016.diakses pada tanggal 5 Maret 2016.
- Ribble M dan Bailey Gerald (2007). *Digital Citizenship In School*.Washington DC:ISTE
- Setiawan T. (2009). *Panduan Internet Untuk Anak*. Yogyakarta: A Plus Books
- Somantri, NM (2016). Materi Kuliah Kajian Mandiri Program Doktorat Prodi PKn UPI.
- Van Dijk. (2015). *Dipresentasikan pada Sharing Sesion* di DPPM Universitas Telkom, 13 Agustus 2015

